

buletin **MAHKAMAH**

Edisi VII Tahun Ke-17 September-Oktober 2006

Kurikulum Pendidikan Hukum (Kritis)

Laporan Khusus

Hukum yang Tidak Memanusiakan Manusia





Sebuah Awal...

Tak biasanya, MAHKAMAH penuh "sesak". Bahkan untuk sekedar meluruskan kaki ketika duduk. Atau untuk mencari tembok sandaran yang nyaman. Itulah hal yang terjadi ketika rapat awal pembahasan tema sampai pada deadline yang seperti biasa, menimbulkan shock effect yang luar biasa bagi awak baru yang masih awam berproses dalam MAHKAMAH. Sesak yang membawa gairah baru pada proses penerbitan buletin perdana bagi kepengurusan baru 2006-2007 ini, dan kehidupan MAHKAMAH kedepan. Awak baru 2006-lah yang menimbulkan gairah itu, setidaknya menunjukkan bahwa masih ada yang peduli untuk berjuang menuju perubahan, yang lebih baik. Dan tentu saja untuk terus melawan ketidakadilan yang ada. Hal itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kepengurusan baru untuk menunjukkan eksistensinya, setidaknya dalam satu tahun kepengurusan kedepan.

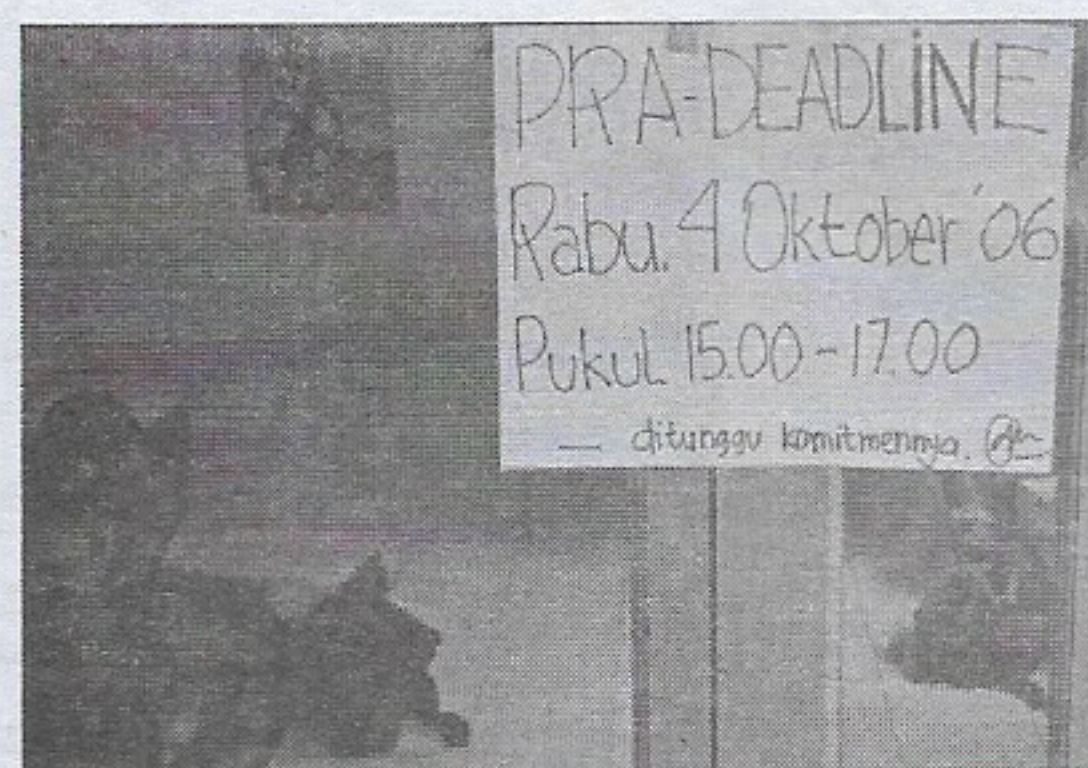


Meski perjuangan ini lebih berarti daripada sekedar eksistensi.

Gagasan-gagasan baru dan ide segar pun bermunculan, hingga lahirlah berbagai tema yang penting untuk diangkat dalam buletin ini. Laporan Utama kami akan banyak mengangkat perihal kurikulum baru untuk angkatan 2006 dan program D-3 Hukum yang sarat kontroversi, beserta hasil polling yang menampilkan data dan realitas dari isu tersebut. Sementara itu tim Laporan Khusus kami bekerja keras untuk mewacanakan Gerakan Hukum Kritis, sebuah jawaban atas budaya positivisme dalam hukum yang entah kita sadari atau tidak efek negatifnya kian membesar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan jika anda yang mempunyai hobi travelling, refreshing, dan bershopping-ria, pilihan yang sangat tepat untuk

kuliah di Fakultas Hukum UGM, karena ternyata fakultas anda ini mempunyai program tahunan "jalan-jalan ke Jakarta". Asyik bukan?

Tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat Idul Fitri 1427 Hijriah. Kepada kawan-kawan angkatan 2006, selamat berproses bersama dalam Fakultas Hukum. Tinggalkan apatisisme. Hapus segala pragmatisme. Kita, generasi muda bangsa, memiliki peran yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menjadi seorang "mahasiswa". Musuh telah makin nyata menghadang langkah kita, kawan. Mari berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik, setidaknya kita mulai dari sini, di fakultas tercinta ini. Lewat sebuah ruang kecil, MAHKAMAH. (***)



Redaksi

Kawan Udin

-FH UGM membuka program baru D3 bertujuan menghasilkan lulusan *paralegal* berkualitas.

-*Paralegal apa paralysed legally?*

-Mulai tahun ajaran 2006, FH UGM menerapkan kurikulum pendidikan hukum baru.

-Yaah, namanya juga mau Lebaran, kalau ga baru, ga afdol

Sekilas Cover

Untuk pertama kalinya, MAHKAMAH memakai model untuk covernya. Dan perempuan beruntung-meski masih sendiri-itu adalah Mbekayu Osi. Mahasiswa yang membenci daging ayam dan telur ini, dahulu ingin masuk Manajemen UI meski akhirnya terjerambab di FH UGM. Kecocokan adalah hal yang penting dalam mencari partner hidup, tandas pencinta masakan mie yang agak pedas belakangan ini. Kedepannya dia ingin mendapatkan suami yang p e n g e r t i a n

Diasuh oleh Aa' Jodie al-Buchory

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa

MAHKAMAH

BPPM FH UGM

Relindung : Tuhan YME **Dewan Penasehat :** Jeremias Lemek, Zainal Arifin M.H, S.H., LL.M, Wadek III FH-UGM
Pemimpin Umum : Wahyudi Dja'far **Sekretaris Umum :** Dewi Kartikasari **Bendahara Umum :** Saida Rahmawati
Pemimpin Redaksi : Gitra Putri P.P **Sekretaris Redaksi :** Sekar Anindyajati **Redaktur Pelaksana :** Kardhika C.B, Svetlana A. Prasasthi **Redaktur Bahasa :** Irene Dian Pratiwi **Redaktur Hukum :** Aditya Nugraha Iskandar
Redaktur Kampus : Ayu Arismawati **Redaktur Opini :** Dicky Angga Kusumah **Staf Redaksi :** Tiara Widyantini, Dedy Trijatmika, Sri Ari Ambarwati **Pemimpin Perusahaan :** Rony Aryono Putro **Kepala Sub. Divisi Produksi :** Setiawan Widiatmoko **Kepala Sub. Divisi Marketing :** Febrina Ayu Scotiati **Staf Perusahaan :** Delta Arga Prayudha, Kusumaning Triastina **Kepala LitBang :** Herlin Susanto **Kepala Sub. Divisi Riset&Diskusi :** M. Fathi **Kepala Sub. Divisi PSDM :** Mia Dwiyaniti **Awak 2006 :** Achmad Fendy Hasyimmi, Arima Koyimatus, Ayu Riandini, Budiyanoto, Hadiati Rahmi, I Gede Mahatma Y.W, Imam Munandar, Indira Ahdiyanti Utami, Leonardus Tirta S, Lily Oktari, Muhammad Fathir, Pinasthika Prasmadhani R, Reina Hakim Hironima, Samsu Harmanto, Valencia



Kisah Pengembara dan Pak Tua

Hampir separuh luas bumi pernah ia jejak. Kisah seorang pengembara tua, yang memilih hidup mengembara dari semenjak awal kedewasaannya. Hidup yang terasa hampa, kesempurnaan yang tak kunjung menyapa, dan gunjingan orang tentang kekurangan dirinya, memberi kekuatan pada sang pengembara, untuk lari meninggalkan seluruh keajegan hidup. Harapannya, suatu saat kelak dia akan menemukan jawaban, atas semua persoalan yang mengganggu pikirannya. Dia berjalan terus, terus dan terus, tanpa tujuan, tak tahu jawaban itu bersembunyi dimana. Tiada terasa, semakin hari, semakin banyak yang diketahuinya. Semakin luas ilmunya, sebab hal-hal yang baru didapatinya. Semakin lama, ia semakin lupa akan apa tujuannya mengembara. Keangkuhan merajainya. Ia menjadi tak lebih dari seorang "cerdik pandai" keliling, yang memberi petuah-petuah pada setiap orang yang ditemuinya.

Singkat cerita, sampailah ia pada salah satu sisi bumi. Disana, ia bertemu dengan seorang tua yang sedang duduk mencakung di bawah pohon. Tertarik, ia mendekati pak tua dan mengucapkan salam. "Apa yang kau lakukan disini pak tua?" pak tua itu berpaling sejenak, tersadar dari alam pikirnya. "Seperti yang kamu lihat anak muda, aku sedang duduk berfikir, hidupku hampa, seperti kehilangan sesuatu, aku tidak tahu, harus mencari kemana lagi. Karena itu, aku berhenti disini, berpikir." Lalu pengembara itu berkata, "Wah, kau tidak akan pernah mendapatkan apapun dengan diam disana pak tua. Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus pergi mencari, jika perlu bertanya pada orang yang lebih tahu. Bahkan jika mau, aku bersedia menemanimu. Aku juga merasakan hal yang sama. Bagiku, tak ada jantung, yang ada adalah sebaran nadi berdenyutan, yang harus segera kita jawab dan bla bla bla..." Selesai pengembara itu bicara, pak tua terdiam sesaat, perlahan menjawab

pejelasan panjang lebar Sang Pengembara, "Tapi, nak, bagaimana mungkin aku mencari? Sedangkan apa yang hilang saja aku belum tahu?"

Dan kali ini, terdiamlah keduanya.

▢

Yang ingin saya bicarakan disini, tentu bukan indahnya hikayat, alam dongeng, tempat mimpi-mimpi bertemu. Toh, bermimpi adalah lebih sama dan lebih universal daripada kegilaan. Kata Descartes.

Tapi nilai. Pesan.

Bahwa, alangkah jarang kita mencoba bergulat dengan pikiran. Mempertanyakan segala sesuatunya. Kita lebih memilih untuk mengambil langkah taktis dan praktis ketika menghadapi suatu masalah. Berharap bertemu dengan penyelesaian. Mungkin ini memang masalah kultur. Atau memang logika pikir kita yang mandeg. Emoh berfikir yang "berat-berat". Apa yang tampak mata itu yang digarap, yang dengan sombongnya, kita bilang-kita pikirkan jalan keluarnya.

Saya memilih kata ganti, "kita" untuk tidak terjebak pada perasaan benar sendiri dan merasa memiliki selimut kearifan paling lebar.

▢

Dan alegori ini ingin saya singgung dengan pendidikan. Tentang ilmu. Tentang fungsi pendidikan, humanisasi. Memanusiakan manusia. Kesadaran sejarah menemukan tekanan pada kondisi dan tindakan, kemudian menentang yang senang pada ketidaktahuan, melawan ilusi. Maka kita pun belajar. Koridor yang dibangun lurus-lurus, tanpa rasa. Hegemoni yang dibangun dalam batas kesemuan..

Katakanlah koridor ini bernama kurikulum. Kondisi yang membuat kita semua, pada akhirnya menjadi seorang lemah, berjalan terus tanpa pemikiran. Kita tak ubahnya sebuah sistem kerja, yang telah ditentukan secara menyeluruh. Dicitak menjadi pola-pola berbeda yang dibuat sedemikian rupa, atau sekedar modifikasi yang memiliki cukup kemampuan. Pelajar, tak lagi memiliki identitas ke-manusia-annya. Kita tidak lebih mulia daripada sebuah robot. Tidak ada kesempatan otak sendiri untuk berpikir. Tidak ada ruang untuk mengasah rasa. Hanya menerima saja apa yang diberikan-atau mungkin kita sendiri yang terlalu mudah pasrah pada keadaan, toh, lama-lama akan terbiasa pula- Entahlah. Semakin banyak saja manusia tanpa rasa yang hidup, tumbuh di muka bumi ini.

Sampai pada suatu moment, dimana kita sadar, bahwa ada yang kurang, ada yang hilang dalam sistem pendidikan kita. Berbagai kurikulum dibangun. Sistem baru. Dengan variasi bungkus, substansi dan teknis pelaksanaan. Mulai dari kurikulum 1994, diganti lagi kurikulum 1998, kurikulum berbasis kompetensi, dan seterusnya. Satu demi satu diklaim sebagai perbaikan dari kurikulum yang lalu.

Dan, kita masih terus saja merasa menemukan, tanpa tahu secara pasti, apa yang hilang.

bersambung ke hal. 18

Perubahan Kurikulum,



Awal tahun ajaran baru sudah dimulai. Memasuki babak baru, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum yang baru pun dicetak dengan maksud menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kurikulum-kurikulum yang berubah berubah seiring dengan pergantian waktu. Tapi, benarkah pergantian kurikulum yang kita inginkan? Apakah perubahan kurikulum ini adalah alternative memperbaiki kualitas pendidikan hukum? Atau, bahkan tak ada kaitan diantara keduanya? Mungkin, bertanya saja tak akan pernah cukup.

Perubahan kurikulum ini menurut Dr. Sudjito, S.H., M.Si merupakan suatu perangkat dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, dari input yang baik untuk membuat output yang baik. Bukan sekedar mata kuliah, tapi merupakan sarana untuk menjabarkan visi dan misi dari fakultas hukum ini. Wajib dipahami, bahwa kurikulum ini hanya merupakan suatu perangkat. Suatu perangkat sistem pengajaran yang harus bisa mengupayakan sesuatu yang baik pula. Dan, dalam melakukan suatu perubahan harus memikirkan bagaimana dampak-dampak dari perubahan tersebut, lebih baik, atau bahkan lebih buruk? Terlebih ini masalah pendidikan. Pendidikan bagi generasi penerus bangsa, yang akan memajukan bangsa.

Adalah SCL (Student Center Learning), suatu metode yang dipilih dalam kurikulum baru kita. Metode yang diklaim berbasis pada problem dan kasus di dalam masyarakat. Dalam SCL, dosen berfungsi sebagai fasilitator, bukan lagi seorang diktator, atau seorang pendogma. Mahasiswa diposisikan tidak lagi sebagai objek. Mahasiswa adalah center, pusat dari proses pembelajaran. Materi tidak lagi disampaikan satu arah,

namun dalam konsep diskusi. Mahasiswa belajar sendiri terlebih dahulu, untuk kemudian mendiskusikannya pada pertemuan selanjutnya.. Sedangkan mengenai tujuan dari perubahan kurikulum ini adalah untuk membentuk karakter dari seorang mahasiswa hukum yang memiliki nilai tersendiri dan berbeda dengan mahasiswa lainnya. Seperti adanya perubahan penempatan salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah Etika Dan Profesi Hukum yang dulu diberikan pada akhir semester yang sekarang ditempatkan di semester pertama. Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada mahasiswa baru bahwa seorang ahli hukum itu nantinya akan menjalani profesi dan memiliki etika hukum yang ideal dengan apa yang dibutuhkan dalam realita sosial kehidupan masyarakat. Selain itu adanya penambahan mata kuliah yakni mata kuliah Bahasa Hukum dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang dipadatkan. Jika dahulu Pancasila dan Kewarganegaraan dipisah, maka sdekarang disatukan dengan nama mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Demikian pula dengan mata kuliah Bahasa Hukum. Tidak lagi hanya mempelajari bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris Hukum. Kini kedua mata kuliah tersebut diringkas jadi satu dengan tambahan materi bahasa Belanda. Dengan harapan, dapat mendukung proses pembelajaran dan praktek nantinya.

Ada sebagian mahasiswa yang merasa bingung dengan adanya perubahan tersebut. Mereka mengeluh karena adanya perubahan tersebut menyebabkan studi mereka terhambat. Karena perubahan tersebut, mereka tidak dapat menyelesaikan beban sks mereka sesuai rencana. Tapi ada juga mahasiswa yang tidak masalah dengan diubahnya metode dan mata kuliah tersebut. Namun, keluhan besar terkait perubahan kurikulum tersebut bukan pada orientasi kelulusan. Bukan. Karena yang mereka kehendaki sebenarnya adalah perubahan terhadap pola pembelajaran yang dilakukan oleh para tenaga pengajar yang ada karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya para dosen sering kali melakukan metode cara mengajar yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan mahasiswa pada umumnya. Bukan perubahan mata kuliah.

Selain orentasi, latar belakang penciptaan progam baru juga sangat mempengaruhi hasil akhir nantinya. Karena ini mempengaruhi motivasi pelaksanaan progam tersebut. Apakah ini benar-benar murni untuk menciptakan lulusan yang baik dan sesuai harapan masyarakat atau orientasi lain yang melatar belakangi terciptanya progam tersebut. Salah satu pengelola membantah jika, perubahan kurikulum ini dilakukan demi "proyek" semata. Karena ini dibentuk atau diubah untuk mengidealkan seorang sarjana hukum yang merupakan bagian dari masyarakat yang terpenting dalam mewujudkan kedilan yang merata

bukan berpihak. Serta menjadikan seorang lulusan yang siap bekerja demi mewujudkan kehidupan hukum yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya yang menginginkan keadilan. Tapi, benarkah?

Kurikulum adalah sebuah sarana pendukung dari sistem pembelajaran dengan tujuan untuk membentuk atau menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan realita dalam masyarakat, demikian ungkap Sigit Riyanto, S.H., dosen Hukum Pidana FH-UGM. Akan jadi percuma, jika tidak didukung keaktifan mahasiswa dalam mencari informasi-informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran.

Pada satu sisi ini dapat dimengerti, tapi di lain pihak semua ini tergantung dari pelaksana kurikulum tersebut. Sebab dosen adalah salah satu pihak dari organ pendukung pelaksanaan kurikulum. Dosen juga memiliki peran yang besar dalam menentukan hasil lulusan nantinya. Dosen pula yang sedikit atau banyak, dapat mempengaruhi sikap kritis dari mahasiswa. Jadi organ inilah yang mempengaruhi pola gerak mahasiswa dalam mencari untuk sekedar memperoleh atau mendapatkan pengetahuan ilmu hukum yang mereka harapkan ketika mereka memilih masuk di FHUGM.\

Perubahan kurikulum seharusnya diikuti dengan perubahan metode pembelajaran, namun hal ini tidak berlangsung di semua kelas. Perubahan metode pun harus dirangsang oleh kemampuan dosen atau perubahan gaya mengajar yang berbeda. Substansinya juga harus dikaji ulang. Demikian juga dengan pembagian kelas. Idealnya, dengan metode tersebut, satu kelas diisi oleh 30-40 mahasiswa, sehingga pembahasan materi dapat berjalan dengan baik, demikian pula dengan diskusi. Kalau 1 angkatan dibagi 3 kelas, dengan perkiraan satu angkatan ada 250 mahasiswa, maka yang terjadi adalah kelas besar. Dalam kelas sebesar itu, situasi diskusi yang kondusif dan focus tidak mungkin terjadi.

Seorang sarjana yang mampu hidup dan berkompetisi dalam masyarakat, yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang digalinya selama bertahun-tahun, tidak terlepas dari bagaimana kampus menggiring pendidikan dan menanamkan ajaran-ajaran kepada mahasiswanya. Bukan berarti mahasiswa bersifat pasif, namun pondasi, dasar-dasar, keilmuan tetap harus didapat.

Haruskah?

Tim Laporan Utama

M. Fathir, Samsu Harmanto, Imam Munandar, Hadiati R, Arima K, Rheina Hakim M, Valencia, Ayu Riandini.

perubahan

dalam melakukan suatu perubahan harus memikirkan bagaimana dampak-dampak dari perubahan tersebut, lebih baik, atau bahkan lebih buruk?

Kenyataannya, selama ini ilmu-ilmu pengantar, ilmu-ilmu dasar, telah disalah pahami. Cuma pengantar, biarlah disampaikan oleh dosen-dosen baru. Biarlah disampaikan dalam kelas besar. Padahal, begitu pentingnya ilmu-ilmu dasar ini, di universitas luar negeri, Pengantar Ilmu Hukum disampaikan oleh seorang professor. Terlebih dari ilmu hukum yang jangan hanya dipelajari dari rumusnya, tapi dipelajari sampai ke makna. Rumusnya pasti mengandung makna yang luas, oleh karena itu harus dipahami betul, demikian kata Dr. Soedjito, S.H., M.Si. Ditambahkan lagi oleh Zainal Arifin M.H., S.H.,LLM., bahwa substansi dari suatu kurikulum harus mencerminkan objek yang bersifat teologis, fisis, matematis dan metafisis. Sedang kurikulum sekarang kebanyakan bersifat fisis, mengajarkan hukum rasional atau ilmu hukum barat. Fakultas hukum menyiapkan sarjana hukum yang berjiwa Pancasila, bersifat terbuka, dapat menghargai pendapat orang lain dan memahami dasar-dasar pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Cakap dalam memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan berdiri sendiri dalam memajukan ilmu pengetahuan, menguasai ilmu hukum dan teknis-teknis analisis guna mengadakan penelitian dan pemahaman seluruh proses hukum. Serta dapat memajukan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu hukum pada khususnya dan pengetahuan sosial pada umumnya seperti yang terdapat dalam tujuan pendidikan Fakultas Hukum UGM. Sungguh sebuah tujuan yang "indah". Tapi, apakah keseluruhan orang yang berlabel mahasiswa di Fakultas Hukum UGM mampu melaksanakan dan mendapatkan itu? Tunggu dulu. Ternyata, masih ada saja mahasiswa yang

berpendapat, bahwasannya apa yang ia dapatkan selama kuliah sangat jauh dari visi dan misi pembelajaran di FH.UGM apalagi mendekati. Terkadang mahasiswa hanya mendapatkan nilai, tapi substansi dan value dari materi yang diberikan, tidak mereka dapatkan.

Maka, memang harus ada pendukung yang dapat mewujudkan hal tersebut. Artinya semua organ-organ yang ada harus mendukung perubahan paradigma dan metode tersebut. Karena tujuan suatu perubahan akan tercapai jika semua pihak atau organ pendukung melakukan perubahan tersebut tanpa diganggu oleh kepentingan-kepentingan dibalik perubahan tersebut. Maka, mau tidak mau, kepentingan yang ada di balik perubahan kurikulum itu harus dihapuskan. Sehingga semua yang akan didapat oleh sebagian mahasiswa dengan perubahan kurikulum ini akan sedikit melegakan dan menjawab pertanyaan yang selama ini mengganggu.

Jika kita kaitkan pola pembelajaran yang tidak berubah dengan perubahan kurikulum itu sangat berbanding terbalik. Intinya perubahan kurikulum tidak akan ada hasilnya tanpa dibarengi dengan perubahan pola pembelajaran oleh para pengajar. Kualitas dari pembentukan mahasiswa juga harus diikuti oleh kualitas dosen mendidik, disini dosen bertindak bukan hanya sebagai pengajar, namun juga mendidik mahasiswanya agar menjadi orang-orang yang terbaik. Perubahan zaman mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan sikap mental, kritis dari mahasiswa. Jika seorang dosen masih mempunyai sikap feodal terhadap hal-hal yang menyangkut mahasiswanya dan perkembangan dunia hukum, itu akan memupuskan rasa cinta dan keinginan yang besar mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan yang digalinya tersebut. Semuanya akan kembali absurd ketika, dosen masih saja menerapkan cara-cara mengajar yang seharusnya expired 5 sampai 10 tahun yang lalu, tapi mahasiswa harus mengikuti segala omongan, penerapan, keinginan dosen dan tidak boleh mengkritiknya. Diibaratkan dosenlah tempat menggantungkan nafas selama dia berstatus sebagai mahasiswa. Hal-hal seperti itu yang akan mematikan profesionalitas penerapan kinerja dosen dan pendidikan termasuk kurikulum yang sudah dirancang sedemikian rupa agar sarjana hukum menjadi orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi, yang mampu menjadi jawaban atas carut marutnya

hukum di Indonesia.

Terlepas dari adanya pro dan kontra tentang adanya perubahan kurikulum ini, pada hakekatnya, tujuan untuk memperbaiki kurikulum yang lama agar mendukung proses pembelajaran yang ada di kampus kita ini. Agar sesuai dengan harapan kompetensi mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang mampu menerapkan dasar-dasar ilmiah dan pertimbangan rasa pada masalah-masalah hukum, baik nasional maupun internasional. Serta mampu menerapkan dan mengembangkannya dalam kehidupan sosial melalui peran-peran yang tersedia baginya. Seorang mahasiswa yang berjiwa terbuka, kritis, toleran terhadap perbedaan pendapat dan mampu melakukan analisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat. Seorang manusia pembelajar yang memiliki kepekaan sosial tinggi terutama menyangkut masalah-masalah hukum dan keadilan dan mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian hukum yang mereka miliki.

Tetapi, toh kenyataannya, menghakimi diri sendiri jauh lebih sulit daripada menghakimi orang lain. Sudahkah kita bertanya, pada diri sendiri, sejauh mana kita ikut berperan dalam mengubah kultur belajar di FH UGM ini? Jangan-jangan, permasalahan juga terletak pada kita, pada mahasiswa. Kita malas berpikir. Membiarkan pertanyaan-pertanyaan lewat begitu saja, tak berselera untuk mengkaji lebih dalam. Berat. Atau orientasi kita yang memang malah mendukung sistem belajar konvensional, asal cepat lulus, cepat dapat pekerjaan, cepat kaya? Sejenak merenung, nampaknya menjadi penting saat ini. (*cb*g)

Muhamad Fathir Edison





Tim Laporan Utama

M. Fathir, Samsu Harmanto, Imam Munandar, Hadiati R, Arima K, Rheina Hakim M, Valencia, Ayu Riandini.

Program D3 Hukum,

Orang bilang, kita tidak boleh cepat-cepat hilang akal dalam kondisi apapun. Apalagi sekarang, ketika sekat-sekat ruang dan waktu mulai lepas, ketika yang dinilai adalah bentuk dan bungkus. Maka, kecerdikan pikir, menjadi penting disini. Meski harus mengorbankan orang lain. Meski harus melupakan nilai luhur dari dianugrahinya kita, manusia, dengan rasa, akal, dan budi.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Pelayanan yang lebih cepat dan sederhana akan sangat membantu proses penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat. Selain kepastian hukum yang juga dirasa menjadi hal yang penting. Dengan ketersediaannya tenaga ahli hukum madya yang mempunyai ketrampilan pelayan hukum sangat menunjang tugas profesi di bidang hukum. Paling tidak beberapa hal itulah yang melatarbelakangi pembukaan Program D3 Hukum pada Fakultas Hukum UGM. Pihak fakultas beranggapan bahwa tenaga ahli madya sangat diperlukan untuk menunjang serta membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat. Aneh memang. Ketika Program Diploma di UGM banyak yang dihapus, Fakultas Hukum malah membuka Program D3 Hukum.

Menurut salah seorang sumber dari pengelola Program D3 Hukum, yaitu Sigid Riyanto S.H., S.U bahwa pembukaan Program D3 Hukum ini sudah melalui kajian yang dilakukan lebih dari setahun. Selain itu juga adanya bidang hukum yang belum terfikirkan terutama dalam pelayanan jasa hukum mengilhami pembukaan program D3 Hukum ini. Mengenai latar belakang pembukaan Program D3 Hukum yang *out put*-nya disebut tenaga hukum madya atau paralegal, adalah untuk menghasilkan tenaga hukum yang cekatan, terampil, dan siap pakai untuk dipekerjakan pada kantor notaris, pengacara, atau bahkan LSM. Menurut para pemakai jasa lulusan Fakultas Hukum yang telah menjadi Sarjana Hukum, bahwa seorang lulusan dari Fakultas Hukum tidak cukup terampil dalam mengerjakan pekerjaan praktis. Mereka harus menuntunnya.

Paralegal tersebut nantinya diharapkan dapat masyarakat miskin dalam mencari keadilan di luar pengadilan dan mampu untuk membantu para peneliti bidang hukum dalam melakukan penelitian ke daerah. Lulusan D3 Hukum diharapkan mau dan mampu ditempatkan di kecamatan atau bahkan kelurahan.

Masih menurut Sigid Riyanto S.H., S.U Program D3 Hukum merupakan permulaan atau dapat dikatakan persiapan Fakultas Hukum UGM dalam menyambut UGM sebagai sekolah ilmu terapan. Dengan status UGM sebagai sekolah ilmu terapan, maka setiap fakultas harus mengadakan program studi atau jurusan yang dapat memberikan ilmu-ilmu yang bersifat praktis kepada para mahasiswanya. Dia juga menambahkan sekaligus membantah bahwa pembukaan Program D3 Hukum ini hanyalah proyek untuk mencari uang dari pihak fakultas. Sebagai sebuah program baru, program D3 Hukum tidak mendapatkan bantuan khusus dari APBN atau APBD, semua fasilitas yang digunakan berasal dari pengelola dan dari fasilitas fakultas, lanjutnya.

Program Diploma (D3) Hukum tidak jauh berbeda dengan program D3 lainnya yang hanya mengandalkan praktikum. Pada Program D3 Hukum mengusung porsi pembelajaran 46 sks (40%) teori, dan 68 sks (60%) praktek dengan tenaga-tenaga pendidik yang berhubungan dengan hal yang praktis dipegang langsung oleh seorang praktisi, notaris, jaksa dan pengacara contohnya. Mungkin dengan tenaga pengajar yang berasal dari praktisi dirasa baik, karena mahasiswa diberikan bagaimana cara-cara praktek langsung ke lingkungan pekerjaan dan masyarakat, sebagai tindak lanjut dari materi yang sudah diterima. Tapi yang perlu diingat, sampai kapankah para praktisi tersebut akan bertahan sebagai tenaga pengajar pada program D3 Hukum? Dapatkah mereka melakukan Transfer of

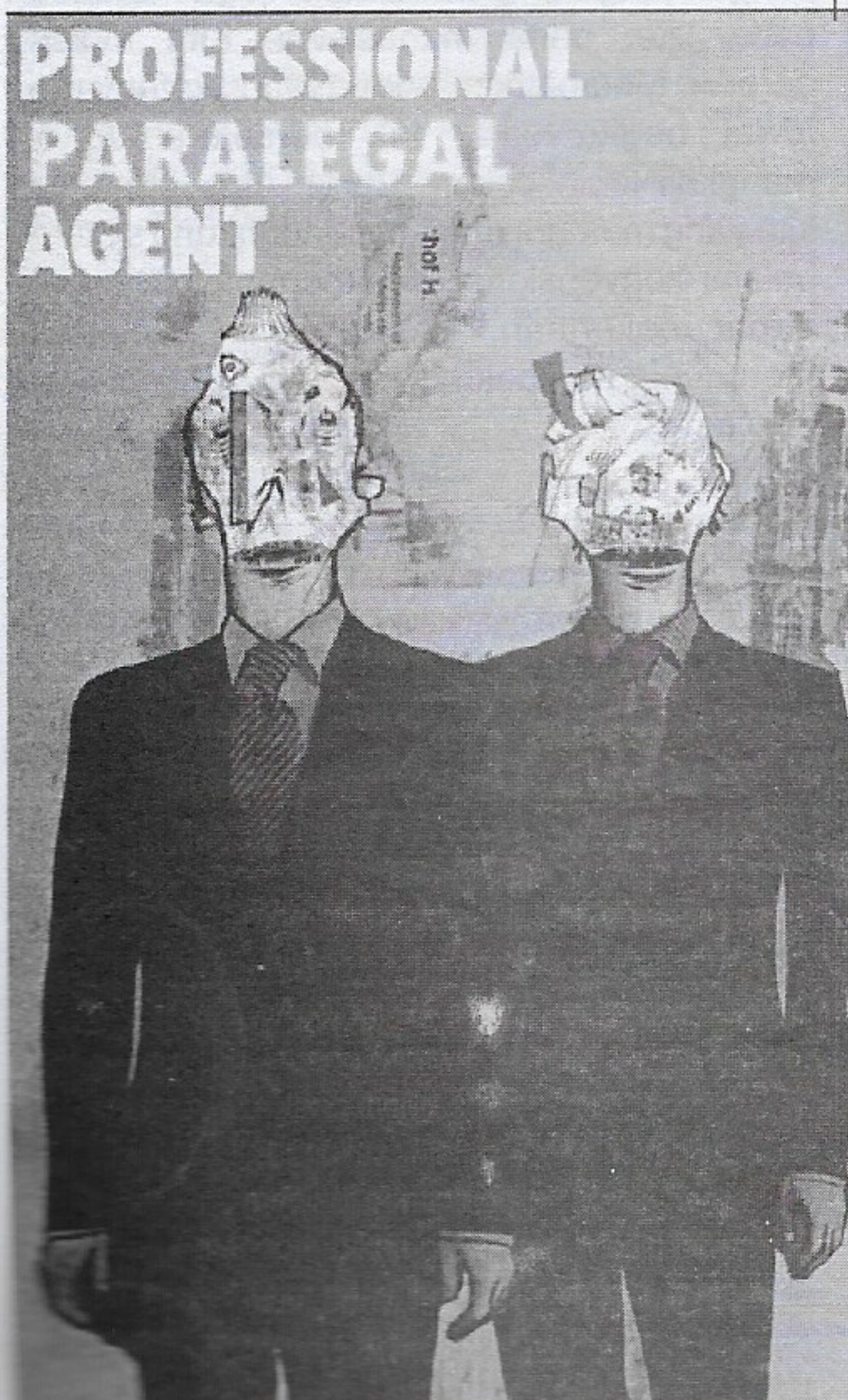
Knowledge kepada mahasiswa? Karena mungkin keterampilan mendidik tidak mereka kuasai. Wajar, mereka bukan orang yang disiapkan untuk mendidik.

Penyelenggaraan Program D3 pada Fakultas Hukum UGM merupakan suatu hal yang absurd. Telah banyak program yang ada pada Fakultas Hukum UGM, yakni ekstensi, swadaya, dan reguler. Padahal, seperti yang kita tahu-dan rasakan sendiri-semua ini tidak didukung dengan fasilitas pembelajaran dan pola pengajaran yang cenderung kuno dan feodal. Sejauh mana ketersediaan sarana dan prasarana untuk membentuk para legal yang-diklaim-terampil dan cekatan itu? Dengan membayar hampir Rp 2.000.000; per sudahkah mahasiswa program D3 mendapatkan fasilitas yang layak? Kenyataannya tidak adanya fasilitas yang memadai. Sekretariat program D3 masih nebeng dengan sekretariat swadaya, perkuliahan dilakukan bersama-sama dengan peserta program reguler, beberapa mata kuliah diberikan di ruang siding dan ruang rehat. Ada kesan, Program D3 Hukum ini hanya sebagai ajang coba-coba dari pihak fakultas. Kesiapan sarana prasarana yang belum matang, dipaksakan.

Seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM berpendapat, pembukaan program D3 Hukum dinilai tidak efektif jika alasannya hanya untuk membentuk lulusan yang siap diterima pasar. Alasan bahwa lulusan S1 Hukum tidak banyak mempunyai jam terbang untuk praktek sedangkan lulusan D3 dirasa mempunyai ketrampilan dan lebih mumpuni dalam bidang hukum dirasa tidak berdasar. Bukankah nantinya mahasiswa program S1 juga terjun ke dunia kerja? Apakah "ketidackapakan" lulusan S1 akan dibiarkan begitu saja? Apakah lulusan fakultas hukum program Strata 1 tidak mampu menjadi tenaga hukum yang berkualitas dan profesional? Apakah tenaga hukum yang berkualitas dan profesional hanya dapat terbentuk dari program diploma sehingga harus dibuka Program D3 Hukum?

Jika memang menginginkan lulusan fakultas hukum tidak hanya menjadi jongos, mengapa tidak mengubah proses pembelajaran pada program S1 (Strata 1) dengan cara menyeimbangkan porsi antara praktek dengan teori. Atau memaksimalkan mata kuliah PLKH, bukan membuat program baru yang dirasa *nyeleneh*.

Dengan mengoptimalkan mata kuliah PLKH sebagai sarana bagi mahasiswa S1 untuk berpraktek seharusnya dapat meningkatkan ketrampilan dan kemahiran seorang lulusan fakultas hukum. Di bidang hukum tentunya. Dan, jelas, mata kuliah pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang hanya 6 SKS sangatlah tidak cukup untuk membentuk lulusan S1 Hukum yang terampil dan cekatan. Belum lagi proses pembelajaran pada mata kuliah PLKH saat ini, tidak ubahnya seperti mata kuliah teoritis lainnya.





Sebuah Pertanyaan Besar Untuk Dijawab

Hanya masuk kelas, duduk, diam, dan pulang. Mahasiswa tidak diberikan bekal yang cukup lewat mata kuliah PLKH untuk terjun pada kehidupan masyarakat yang sebenarnya. cekatan dan terampil tanpa adanya pembukaan program D3 Hukum. Untuk membentuk lulusan fakultas hukum yang siap diterima pasar dan yang cekatan dan terampil, pada setiap mata kuliah yang bersifat lanjutan harus ada jam-jam khusus yang diberikan pada mahasiswa untuk melakukan praktek langsung ke lapangan. Selain itu, dosen juga berperan untuk melakukan perubahan dalam sistem pembelajaran yang ada pada Fakultas Hukum UGM. Dosen sebagai fasilitator bagi mahasiswa untuk berpraktek pada pengadilan, kantor notaris, atau kantor pengacara.

D3 Hukum

Satu hal yang harus dipahami.

Bahwa, tidak semestinya kita ikut dalam arus "keinginan pasar", kompetensi seorang ahli hukum berkualitas seharusnya tidak dihitung hanya lewat ketrampilan praktis.

Tapi juga integritas moral.

Satu hal yang harus dipahami. Bahwa, tidak semestinya kita ikut dalam arus "keinginan pasar", kompetensi seorang ahli hukum berkualitas seharusnya tidak dihitung hanya lewat ketrampilan praktis. Tapi juga integritas moral.

Berubahnya status Universitas Gadjah Mada (UGM) dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) dengan PP No. 153 Tahun 2000 menimbulkan gejolak sendiri dalam tubuh UGM. Subsidi dari pemerintah kepada UGM dihapuskan, sehingga UGM harus mendanai semua kegiatannya. Hal inilah yang dijadikan UGM sebagai dalih untuk "memeras" mahasiswanya dan menganggap mahasiswa sebagai "sapi perahan" yang tidak akan melawan. Label UGM sebagai kampus kerakyatan hilang karena kepentingan penguasa. Kampus yang seharusnya memberi akses sebesar-besarnya untuk rakyat kecil, sesuai cita-cita pendiri Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada dahulu. Sekarang, status UGM sebagai BHMN sudah berakhir dan UGM akan berubah menjadi BHP (Badan Hukum Pendidikan). Namun status BHP saat ini belum terjadi. Artinya di UGM sekarang terjadi

kekosongan hukum. Apabila status BHP ini benar-benar terjadi, maka akan membuat UGM semakin jauh dari predikatnya sebagai kampus kerakyatan, kampusnya wong cilik. Kenapa? Karena subsidi pemerintah benar-benar dicabut, dan UGM harus membiayai sendiri semua biaya operasionalnya. Hal ini dipastikan akan membuat UGM menjadi semakin membabi buta untuk menghisap dan memeras mahasiswanya, karena mahasiswa adalah "sumber dana" yang potensial. Institusi pendidikan diposisikan seperti perusahaan. Pengelolaannya pun seperti pengelolaan bisnis perusahaan. Penghisapan akan turun pada tataran fakultas. Fakultas harus berfikir keras untuk mencari dana demi "kelangsungan hidup"nya dan orang-orang di dalamnya. Tak terkecuali dengan Fakultas Hukum.

Status tersebut, dan adanya aturan bahwa perguruan tinggi negeri tidak boleh membuka jalur ekstensi dari lulusan SMA secara langsung (*Fresh Graduate*), sinyalemen bahwa pembukaan program D3 ini terkait masalah *financial* pun makin kuat. Alurnya adalah, ketika mahasiswa D3 Hukum lulus, diharapkan akan melanjutkan ke jalur ekstensi. Sudah menjadi rahasia umum jika jalur ekstensi merupakan sumber dana yang potensial karena jalur ekstensi cukup mahal. Kecurigaan ini, dikuatkan oleh keterangan seorang sumber yang tidak disebut namanya. Bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam pembahasan pra penetapan atau pembukaan program D3 mengarah pada persoalan untung rugi dan pencarian titik impas karena program swadaya fakultas hukum telah mengalami kemunduran dalam jumlah mahasiswanya. Masih menurut sumber tersebut, bahwa Fakultas tidak mau kehilangan lebih banyak lagi pemasukan uangnya karena mandeg-nya program swadaya. Salah satu jalan untuk tetap mendapatkan dana adalah membuka program D3 Hukum.

Maka, memang menjadi sebuah tanda tanya besar.

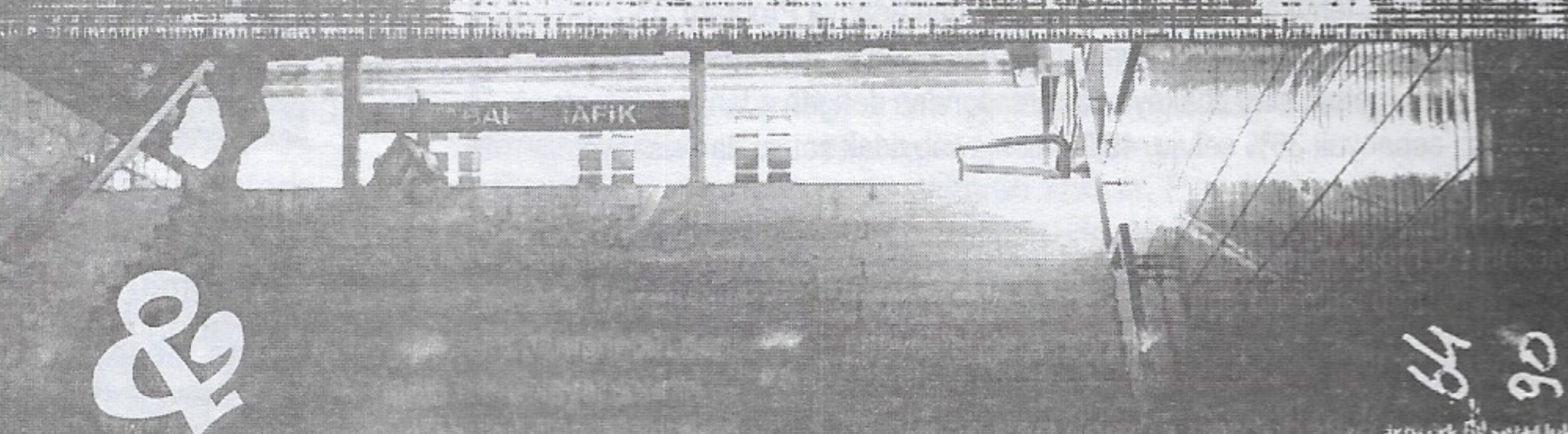
Ketika akan dihapuskannya Program Diploma di UGM, Fakultas Hukum malah membuka Program D3 Hukum. Tanda Tanya besar, akan apa orientasi dari penyelenggara program.

Terlepas dari semua perdebatan yang terjadi berkaitan dengan dibukanya program D3 Hukum, ada hal yang lebih penting untuk kita renungkan bersama. Sangat keterlaluan jika kita nekat menutup mata dan bersikap apatis akan kondisi hukum di negara kita saat ini. Keadilan yang selalu diharapkan oleh masyarakat, acapkali malah dirobek-robek oleh hukum itu sendiri. Mulai dari penyelesaian kasus yang selalu memihak pada penguasa, sampai pada pembuatan peraturan hukum yang, lagi-lagi, menindas rakyat. Sungguh, kemampuan praktis dan kecekatan administrasi seorang sarjana hukum tidak akan ada artinya. Tanpa moralitas. Tanpa kemampuan memakai hati nurani. Sangat besar harapan masyarakat, akan datangnya suatu keadilan, suatu keadilan yang substansial, keadilan yang hakiki. Dan, seharusnya hal ini lahir dari generasi muda. Tanggung jawab mahasiswa FH, calon sarjana hukum masa depan. Tentang keberadaan program D3 FH-UGM, semestinya memang perlu dikaji lagi. Waktu akan menjawab. (*L*g)

Samsu Harmanto

BPPM MAHKAMAH Mengucapkan

Selamat Menunaikan ibadah Puasa



Selamat hari raya Idul Fitri 1427 H

Mohon Maaf Lahir & Batin

11-611372



Mengedjar Kompetensi

Kurikulum pendidikan adalah suatu bagian dari sistem pendidikan itu sendiri yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar di setiap institusi pendidikan.

Tujuan esensial dari kurikulum sendiri adalah menghasilkan lulusan (sarjana hukum) yang berkualitas dan berkompentensi. Dikatakan berkualitas jika lulusan Fakultas Hukum memiliki kompetensi, beberapa kriteria misalnya,

- (1) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan praktis di bidang hukum, nasional dan internasional, serta mampu menerapkan dan mengembangkannya dalam kehidupan sosial melalui peran-peran yang tersedia baginya.
- (2) Berjiwa terbuka, kritis, toleran terhadap masalah-masalah hukum di dalam masyarakat.
- (3) Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, terutama yang menyangkut masalah-masalah hukum dan keadilan dan mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian hukum yang telah didapatkan semasa kuliah dalam memecahkan masalah-masalah hukum dan keadilan.

Bagaimana membuat lulusan Fakultas Hukum yang memiliki kompetensi-kompetensi seperti apa yang disebutkan diatas? Ketiga kompetensi diatas akan dimiliki oleh lulusan Fakultas Hukum apabila, pemilihan dan penerapan kurikulum itu sendiri berjalan dengan baik dan tentu saja didukung dengan adanya kerjasama yang baik pula antara pihak terdidik dan pihak pendidik. Terkait dengan beberapa persoalan yang sedang hangat di kampus kita, antara lain perubahan kurikulum dan juga dibukanya program baru, yaitu program D3 Hukum. divisi Litbang BPPM MAHKAMAH, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, beberapa waktu lalu telah mengadakan polling untuk mengetahui pendapat para responden (mahasiswa). Memang sangat awam apabila mahasiswa membicarakan soal kurikulum dan juga di bukanya Program D3 Hukum, tetapi tujuan dibuatnya polling ini tidak lain adalah untuk mengetahui sejauh mana perhatian para mahasiswa Fakultas Hukum UGM terhadap setiap perubahan yang terjadi di fakultas tercinta ini, apalagi masalah yang menyangkut mahasiswa.

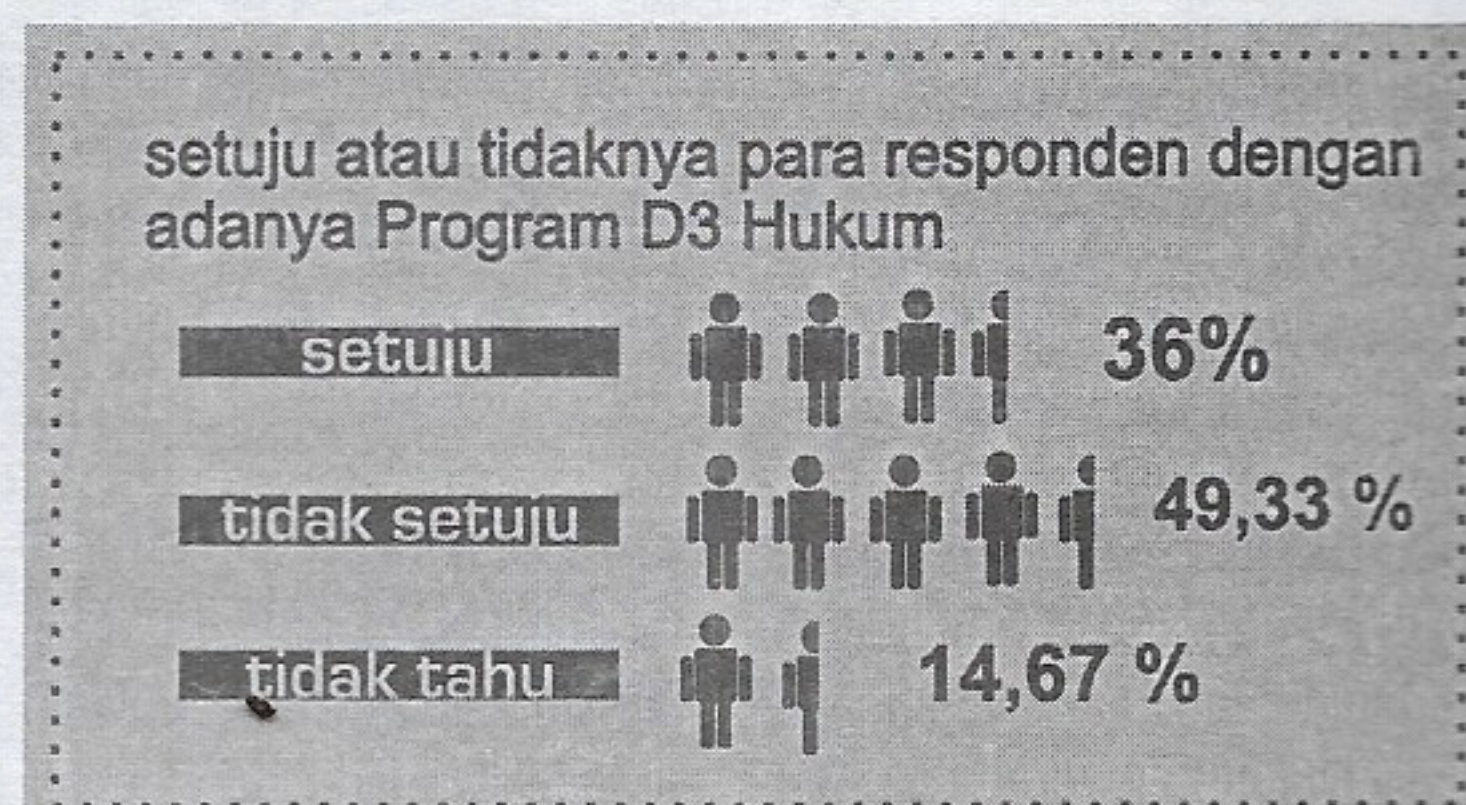
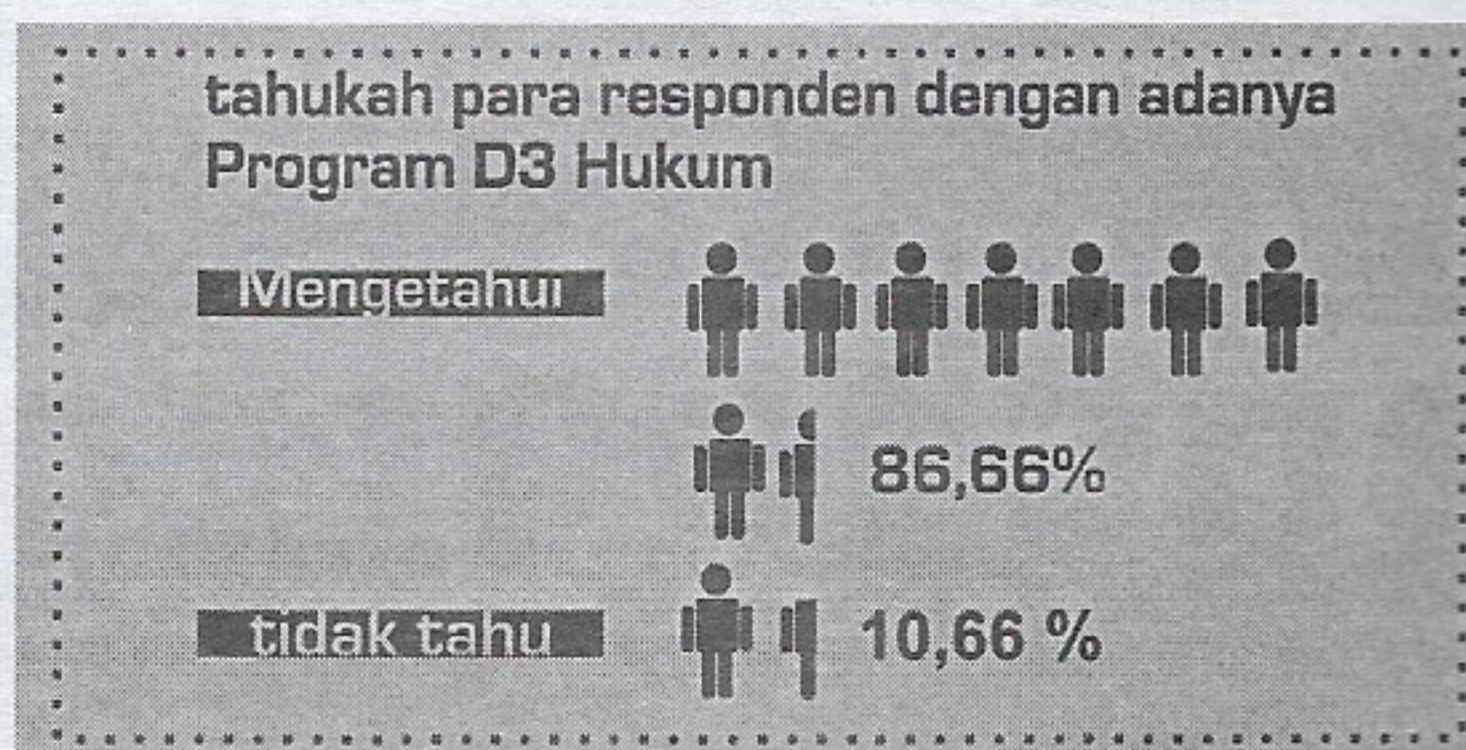
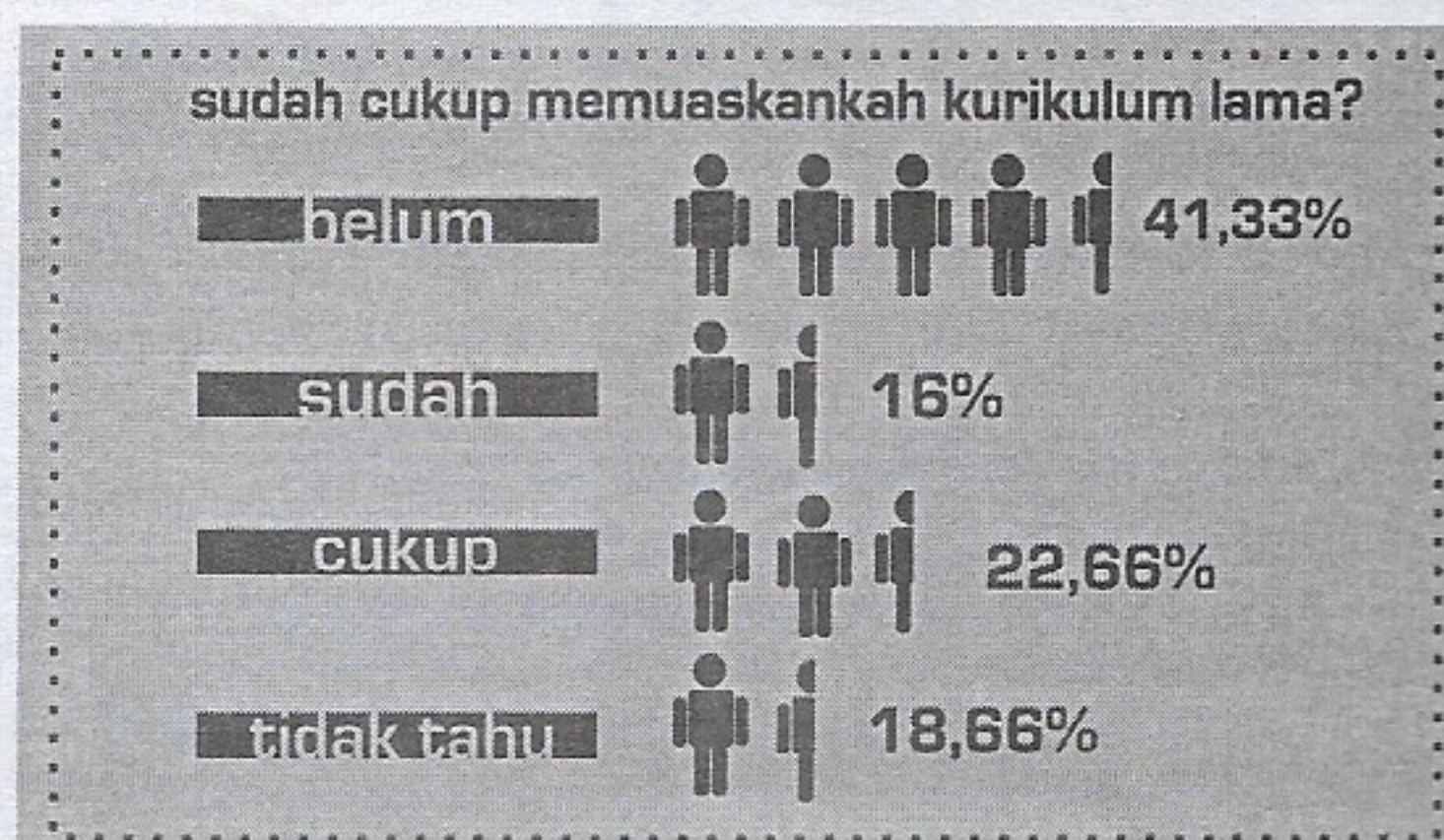
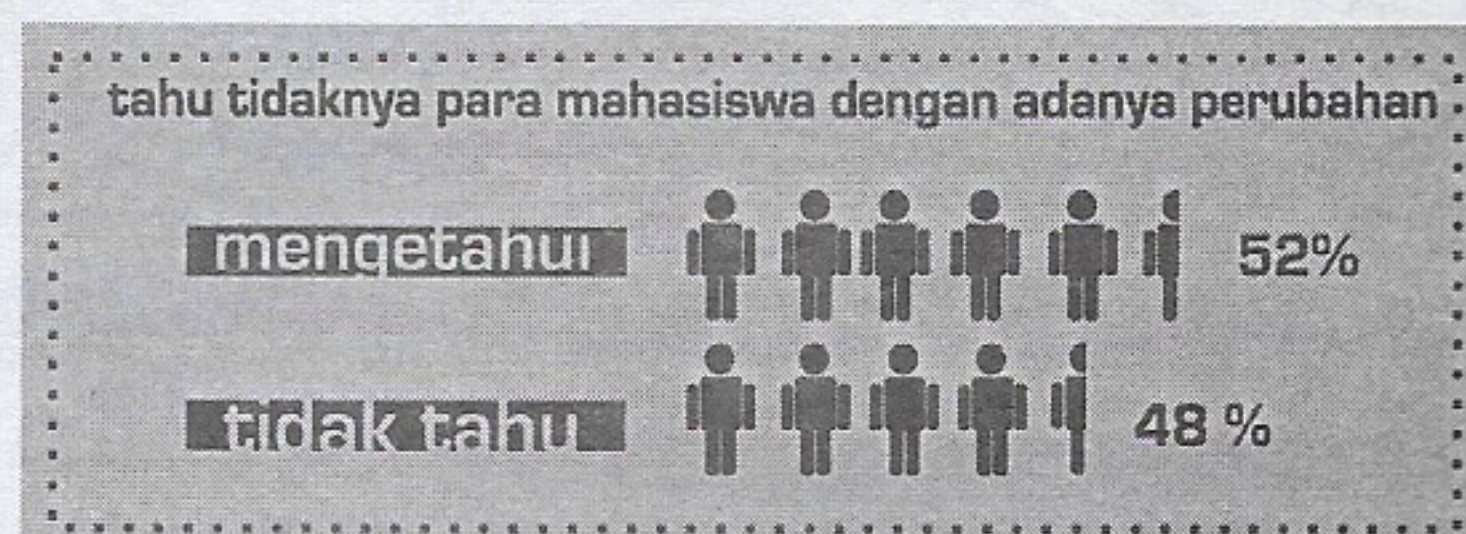
Polling ini melibatkan 75 responden dan dibagi kedalam tiga kelompok angkatan, dari angkatan 2004 sampai angkatan 2006. Terdapat enam pertanyaan dalam polling kali ini, yang terdiri dari lima pertanyaan dengan sistem tertutup dan satu pertanyaan dengan sistem terbuka. Dari hasil polling ini di peroleh fakta, pertama, mengenai tahu tidaknya para mahasiswa dengan adanya perubahan kurikulum, lebih dari setengah jumlah responden, tepatnya 52% responden mengetahui, dan sisanya 48% responden menjawab tidak tahu. Pertanyaan mengenai sudah cukup memuaskan kurikulum lama, sebanyak 41,33% responden menjawab belum, 16% menjawab sudah, 22,66% menjawab cukup. Dan 18,66% menjawab tidak tahu. Mayoritas responden masih merasa kurikulum lama belum memuaskan.

Pada pertanyaan, tahukah para responden dengan adanya Program D3 Hukum, 86,66% responden menjawab Tahu, dan sisanya 10,66 menjawab tidak tahu. Mengenai setuju atau tidaknya para responden dengan adanya Program D3 Hukum, sebanyak 36% setuju, 49,33 menjawab tidak setuju dan sisanya menjawab tidak tahu.

Terkait dengan masalah D3 Hukum yang berhubungan dengan kompetensi lulusan kemudian lapangan kerja bagi lulusan D3 Hukum, pihak-pihak yang telah membuat kebijakan tersebut harus memperjelas tujuan utama dibukanya Program D3 Hukum tersebut dan memastikan agar lulusan D3 hukum nanti tidak menambah jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja di negeri ini. Dengan kata lain apakah lulusan D3 Hukum nanti memang sangat diperlukan atau diminati oleh lapangan kerja? Dalam menyikapi pertanyaan tersebut, responden yang menjawab sangat diperlukan sebanyak 5,33%, sebanyak 21,33% menjawab diperlukan, 37,33% dari responden menjawab belum diperlukan, 29,33% menjawab tidak diperlukan dan sisanya memilih untuk tidak memilih.

Pertanyaan paling terakhir, harapan responden mengenai perubahan kurikulum Fakultas Hukum. Karena pertanyaan paling terakhir ini menggunakan metode jawaban terbuka, maka jawaban yang diberikan oleh responden juga beragam. Jawaban mayoritas yang dituliskan oleh reponden adalah peningkatan kualitas dari sistem pendidikan Fakultas Hukum itu sendiri dan juga mengharapakan, setelah menjadi sarjana hukum nanti, semua lulusan Fakultas Hukum memiliki kompetensi yang dapat berguna bagi dunia hukum dan tentu saja lapangan kerja yang lebih luas lagi. Harapan mayoritas dari responden sekiranya dapat mewakili harapan dari semua mahasiswa FH UGM.

Diharapkan perubahan kurikulum dan juga dibukanya Program D3 Hukum tidak menjadi hal yang sia-sia, melainkan dapat menjadi jalan pintas bagi terciptanya kondisi hukum yang lebih baik lagi di masa mendatang dengan syarat adanya kerjasama yang baik dari tiap-tiap unsur civitas akademika dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kondisi suatu negara dapat ditentukan baik atau buruknya, dengan melihat kondisi hukum dari negara tersebut. (*g)



Inikah Rasanya...Study Tour

Tanpa bermaksud melihat masalah ini secara parsial, namun kiranya akan lebih bijak bila petinggi fakultas mampu memfasilitasi kebutuhan mahasiswanya dengan tidak mengesampingkan skala prioritas.



Lagi, satu tanda tanya besar dialamatkan kepada pihak fakultas, pada para pembesarnya. Sebuah program tahunan yang diberi judul "study tour". Perlu ditilik lebih jauh, dan lebih cermat, tentunya. Berkaitan dengan kurikulum dan (lagi-lagi) transparansi dana. Seberapa jauh pengaruhnya terhadap kebutuhan pembelajaran mahasiswa?

Menurut Harry Purwanto selaku penanggung jawab kegiatan, tujuan dari diadakannya *study tour* adalah untuk menunjukkan pada mahasiswa gambaran tentang dunia yang akan mereka masuki selepas kuliah. Mereka bisa mengetahui secara langsung praktik dari lembaga-lembaga tersebut, yang selama ini hanya diketahui secara teori.

Sorotan muncul dari berbagai sisi. Mahasiswa bersuara tentang program fakultas yang dinilai tidak terlalu *urgent* dan hanya berkesan asal jalan saja. Asal ada bentuknya. Padahal penyelenggaraan acara ini memakan biaya yang tidak sedikit. Bisa dilihat dari besarnya subsidi biaya yang diberikan ke tiap peserta. Subsidi tersebut kabarnya diambil dari BOP (Biaya Operasional Pendidikan). Joko Setiono, salah seorang pendamping dalam acara *study tour* tersebut menyampaikan satu orang mahasiswa mendapat subsidi Rp. 520.000. Padahal peserta ada 80 orang mahasiswa, bila besarnya subsidi dikalkulasikan dengan jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka yang di dapat adalah angka yang fantastis. Belum lagi mahasiswa masih diminta untuk memberikan kontribusi sebesar Rp.100.000, yang berdasarkan keterangan dari Harry Purwanto selaku penanggung jawab acara, kontribusi mahasiswa tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan dana. Berarti total dana yang dibutuhkan untuk mengadakan *study tour* mahasiswa lebih kurang berjumlah Rp. 49.600.000.

MAHKAMAH sempat mendapat informasi mengenai program acara "study tour" tahun sebelumnya yang mengambil tempat di Bursa Efek Surabaya. Pada *study tour* tersebut mahasiswa bahkan sempat mendapatkan pelatihan dan diberikan sertifikat pelatihan walaupun untuk mendapatkan sertifikat tersebut mahasiswa mengeluarkan dana Rp.125.000 untuk acara 3 hari

yang dipadatkan karena ada beberapa hal yang menginjak ranah ekonomi yang dinilai tidak perlu diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, sehingga kontribusi totalnya menjadi Rp.150.000 per mahasiswa.

Jika kita membandingkan kedua *Study Tour* diatas, maka akan timbul pertanyaan baru, mengapa harus mengeluarkan dana lebih, padahal tidak mendapatkan bukti keikutsertaan apapun? Harry Purwanto mengatakan bahwa setiap tahun memang fakultas memberikan anggaran khusus untuk mahasiswa tingkat akhir melakukan program *study tour* tetapi memang setiap tahunnya berbedabeda, tidak ditetapkan secara pasti. Sehingga timbul ketidakpastian tentang alokasi biaya yang digunakan. Tidak ada jumlah yang tepat untuk kegiatan ini.

Study tour kali ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 September 2006. Diikuti oleh 80 mahasiswa fakultas hukum baik reguler maupun swadaya, 4 orang dosen, 2 orang dari bagian akademik, dan 2 orang dari bagian pendidikan.

Tujuan rombongan adalah mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Sekretariat Negara (Sekneg).

Menurut cerita para peserta, di sana mereka mendapat presentasi singkat tentang lembaga yang mereka kunjungi. Apa-apa saja persyaratan untuk bisa masuk, bagaimana kerjanya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kerja masing-masing lembaga. Hanya itu saja. Tanpa diskusi lebih lanjut dan mendalam. Keluhan ini disampaikan Teddy, mahasiswa angkatan 2003 yang juga mengikuti *study tour* kemarin. "Rugi jadinya, kan mahasiswa bukan hanya dari jurusan HTN dan HAN saja. Sehingga kesannya kemarin itu yang diuntungkan hanya mahasiswa dari dua konsentrasi tersebut." suara bernada miring juga datang dari peserta lain yang menyayangkan tidak jelasnya konsep dari *study tour* ini. Akibatnya, pihak penerima pun menjadi bingung untuk menyambut peserta *study tour*. Bingung apa yang harus dilakukan. Sehingga, yang terjadi hanyalah kegiatan asal jadi.

Dosen yang semestinya berfungsi sebagai pendamping yang seharusnya membimbing agar terjadi interaksi antara dua pihak ternyata tak lebih sebagai pengantar saja. Tidak ditemukan lahirnya pemikiran-pemikiran yang bisa disampaikan di hadapan peserta diskusi. Senada dengan itu, mahasiswa sendiri lumayan pasif dalam forum waktu itu. "Karena pada waktu *technical meeting* kita tidak diberi gambaran di sana nanti akan seperti apa kegiatannya. Kita hanya diberi pesan untuk menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya.", begitu ungkap Budi, angkatan 2003 yang juga berkapasitas sebagai peserta.

Ketika dikonfirmasi pada Harry Purwanto, S.H., M.H. beliau menyatakan itu karena *misscommunication*. Dituturkannya, *staff* penerima saat dilakukan observasi dan saat menerima peserta *study tour* tidak sama.

Sehingga terjadi kebingungan. Tapi, bukankah seharusnya dalam proposal itu sudah dirinci apa saja yang akan dilakukan sewaktu kunjungan ke lembaga-lembaga tersebut. Sehingga, siapapun *staff* yang menerima bisa melaksanakan.

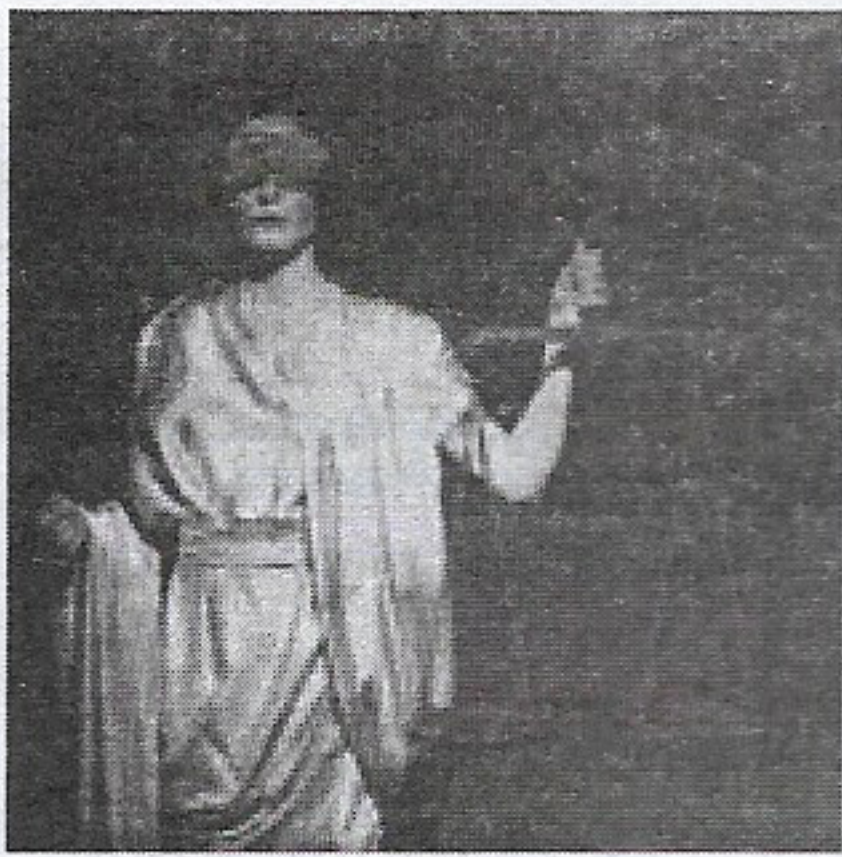
Satu hal lagi, *study tour* yang tidak seperti *study tour*. Lebih tepat disebut darmawisata. Faktanya, alokasi waktu untuk *refreshing* ternyata jauh lebih besar daripada waktu kunjungan ke lembaga-lembaga yang menjadi tujuan primer dari kegiatan ini. *Refreshing* ke ITC Mangga Dua, ke Dufan, dan Cibaduyut memakan waktu lebih dari 2 jam. Bermain di Dufan saja bisa dari jam 3 sore hingga 7 malam! Bayangkan, waktu yang semestinya dioptimalkan untuk memahami kinerja dunia hukum justru dihabiskan dengan "*refreshing*". Tidak penting meributkan hendak pergi ke mana setelah kunjungan ke lembaga-lembaga tersebut, toh ini adalah sebuah *study tour*. Tidak sekedar "*tour*", namun juga *study*, sebagai bagian dari kegiatan belajar. Katakanlah sebuah praktek lapangan. Dan bukan acara jalan-jalannya anak sekolah.

Ketika persoalan yang mendasar yaitu mengenai sarana kuliah di Fakultas Hukum belum bisa sepenuhnya teratasi, uang sekian puluh juta terbuang dalam waktu 3 hari dengan hasil yang bisa dibilang sama sekali tidak maksimal. Sebuah kegiatan yang patut dipertanyakan lagi, perlu diselenggarakan atau tidak. Dana sebesar itu terbuang percuma karena tidak adanya kematangan dalam mengelola program. Meski sebagian mahasiswa berpandangan kegiatan ini perlu karena memperlihatkan dunia kerja setelah mahasiswa lulus dari fakultas hukum. Namun, belum bisa teratasinya permasalahan klasik fakultas yaitu ketiadaan ruang kuliah yang layak untuk sekian ratus mahasiswa tentunya patut diprioritaskan. Alih-alih mengatasinya pihak dekanat malah mengalokasikan uang sebesar itu untuk acara jalan-jalan yang dikamufase menjadi *study tour*. Tidak masalah bila kegiatan ini dipandang perlu untuk mahasiswa dan tidak mubazir tentunya, namun jangan melupakan prioritas. Mana yang lebih pantas tereliminir? Ini persoalan serius kiranya, menyangkut tanggungjawab pihak fakultas terhadap hak mahasiswa.

Tanpa bermaksud melihat masalah ini secara parsial, namun kiranya akan lebih bijak bila petinggi fakultas mampu memfasilitasi kebutuhan mahasiswanya dengan tidak mengesampingkan skala prioritas.

Seandainya bisa lebih bijak, pasti akan dipikirkan program-program yang lebih berorientasi pada kelancaran proses belajar-mengajar dan perbaikan mutu lulusan fakultas hukum. Kita harus tetap optimis, dengan mengawal dan mengkritisi kebijakan-kebijakan fakultas, untuk kemudian mendapat apa yang seharusnya kita dapat selama menjadi manusia pembelajar di fakultas hukum UGM. (*g)

Ayu Arismawati, Tiara Widyantine



Mengenang Positivisme

Terpidana mati, si Bendot, sudah ditembak mati oleh sepasukan eksekusi. Entah berapa banyak timah panas telah bersarang ditubuhnya. Tetapi si bendot tidak mati, dan tepatnya tidak mati-mati. Kepala penjara yang bertanggungjawab pada eksekusi si bendot, gugup. Sebentar lagi, pejabat-pejabat tinggi hukum akan datang ke penjaranya, guna melihat hasil eksekusi itu, dan menyaksikan jasad bandot yang bersimpah darah. Namun, bandot belum juga mati

Kepala penjara memerintahkan kepada pasukan tembak untuk menembak lagi. Maka, berdetamlah suara senapan yang meluncurkan pelornya ke tubuh bendot. Tidak ada serangan apa-apa dari jasad beku itu. Namun suara jantungnya terus berdegup dengan keras. Bendot masih hidup.

"Tuhan mengapa Kau tinggalkan aku?" teriak kepala penjara melihat bendot tidak mati-mati. Kemudian, dicincangnya tubuh bendot, dicabik cabik dan darahnya nyiprat kemana-mana. Dengan rakus, kepala penjara merogoh jantung bendot yang terus berdegup itu. Dibanting ke tanah, dipukuli dengan tongkat kayu, toh jantung bendot yang sudah lepas dari tubuhnya terus berdetak. Dig-dig-dug, dag-dig-dug.

HUKUM YANG

(Tidak)

Penggalan cerita di samping merupakan adegan drama Putu wijaya, LOSS, yang dimainkan dengan apik oleh teater mandiri tahun delapan puluhan di gedung Kridosono, Yogyakarta (Priyadnika:2004). Peristiwa semacam itu, mungkin akan terjadi ketika hukum tidak lagi menyuarakan keadilan, keadilan yang menjadi hak seluruh massa rakyat. Hukum terkesan hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa, mesin penindas, bak robot yang berjalan dengan remote control. Kenyataan yang terjadi sekarang menunjukkan, bahwa aturan hukum telah menjerat pikiran aparat penegak hukum. Hukum hanya dilihat pada aturan yang ada pada teks Undang-Undang, dan segudang kodifikasi, yang bersembunyi dibalik alasan kepastian hukum. Mengapa kemudian hukum tidak mau lagi memperhatikan ketentuan yang hidup dimasyarakat. Pada dasarnya hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat, mewujudkan rasa adil, menyejahterakan kehidupan bersama. Tapi, perjalanannya hukum berbelok menjadi aktualisasi dari ketidakadilan, pelindung dan penindasan penguasa. Hukum berada di bawah telikungan formalisme hukum (positivisme).

Sejarah lahirnya positivisme, tidak terlepas dari praktek kesewenang-wenangan penguasa di masa silam, khususnya yang marak di eropa barat, di abad pertengahan silam. Hukum pada jaman itu, hanya sebatas implementasi dari sabda sang penguasa, *lec'est moi* negara adalah saya-. Hukum yang diciptakan adalah untuk mengekang hak-hak rakyat. Rakyat dijadikan obyek untuk mencapai kepuasan batin sang tiran. Hukum didominasi oleh kepentingan-kepentingan penguasa. Pada kondisi itulah, timbul pemikiran untuk membuat satu aturan untuk membatasi tingkah polah penguasa. Kekuasaan raja adalah sebatas pada apa yang tercantum dalam undang-undang. Pada perjalannya hakim tidak lagi menjadi suara penguasa, tetapi sebagai corong undang-undang, putusannya hanya memperhatikan kepastian hukum, seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Akibatnya, kemanfaatan dan keadilan masyarakat malah terabaikan.

Sebagai sistem filsafat, positivisme muncul pada abad ke XVIII. Paham ini didasari oleh prinsip-prinsip, bahwa yang dapat disebut benar adalah, apa yang terjadi sebagai pengalaman, dan apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, serta hanya ilmu pengetahuan saja yang dapat menentukan sesuatu sebagai kenyataan. Oleh karenanya, semua kebenaran hanya diperoleh melalui ilmu-ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, tugas filsuf pada saat itu adalah, untuk mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan. Paham ini dimotori oleh Saint, Simon, August Comte, dan Spencer. Dan dalam pelaksanaannya paham tersebut sering disebut positivisme sosiologis. Bila ditelaah lebih jauh, paham ini muncul sebagai akibat dari pengaruh ilmu-ilmu eksak, terutama fisika, yang begitu pesat perkembangannya. Jadi, paham positivisme sosiologis sangat identik dengan sosiologi sains. Menawarkan suatu kepastian atau keajegan.

Perkembangannya, di dalam ilmu hukum selanjutnya muncul ajaran yang disebut positivisme yuridis. Sebagai impact dari perkembangan pesat ilmu sosiologi sains. Positivisme hukum mendasarkan diri pada prinsip-prinsip bahwa hukum negara adalah tidak dianggap berlaku, karena hukum mendasarkan diri pada kehidupan sosial, bukan bersumber pada jiwa bangsa, dan bukan pula cerminan dari kaidah hukum alam. Sehingga hukum hanya berlaku karena ada suatu instansi (lembaga) yang berwenang.

Mempelajari hukum yang hanya sebatas bentuk yuridisnya saja, atau dengan kata lain, hanya melihat bentuk formalnya sebagai hukum, dan meninggalkan kaidah materialnya. Berarti hukum tidak dipandang sebagai ilmu pengetahuan, melainkan hanya dipandang sebagai variabel kekuasaan, dan sifatnya sewenang-wenang. Oleh karenanya hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara. Ajaran tersebut dipelopori oleh aliran humanisme, tokohnya antara lain Jean Boudin, seseorang yang khas dengan ide-idenya tentang kedaulatan raja.

Pandangan positivisme mengajarkan, bahwa hukum berangkat dari penggunaan paradigma liberal, yang secara ideologis meyakini, bahwa hukum dapat dikelola, dan dikonstruksi dalam suatu institusi yang normal, terlepas sama sekali dari ilmu politik. Padahal, jelas bahwa hukum adalah produk politik elite penguasa. Hukum dan politik jelas tidak bisa dipisahkan. Sehingga, logika yang mengatakan hukum adalah suatu otoritas yang mampu bertindak netral dan tidak memihak, adalah tidak tepat.

Dalam perspektif keilmuan, teori-teori positivisme dengan metode analitisnya sangat mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan. Karena teori tersebut direduksi menjadi jenis pengetahuan yang mempunyai obyek kajian kasus tertentu, dan diselesaikan

Memanusiaikan manusia

Budiyanto, Aldo, Indira, Pinastika

secara ringkas dengan sekian pasal dalam teks hukum positif. Akhirnya, yang dilakukan adalah, penafsiran-penafsiran yang amat pragmatis dan fungsional, demi memecahkan sebuah kasus belaka. Akibatnya, hukum hanya membentuk individu yang pandai menghafal pasal-pasal diluar kepala.

Dengan adanya persoalan hukum yang sangat kompleks, hukum positif ternyata tidak cukup mampu menjawab persoalan hukum yang semakin berkembang pesat, karena seringkali tertinggal jauh dengan dinamika perubahan masyarakatnya. Persoalan-persoalan kekinian lolos dari jeratan hukum (positif) karena dianggap tidak ada pasal-pasal untuk menjeratnya.

Hukum Yang Memanusiaikan Manusia

Setelah berkembang hampir 30 tahunan, positivisme banyak menuai kritik keras dari para ahli hukum, terhitung sejak tahun 1920-an. Madzhab positivisme dirasa tidak selaras dengan realitas. Dan hanya mengedepankan formalitas hukum, tetapi mengesampingkan substansi hukum itu sendiri. Di Amerika, kritik terhadap paradigma ini sudah jamak dilakukan oleh para tokoh *Sociological Jurisprudence*, maupun para pemikir *Legal Realism*. Terlebih pasca perang Vietnam tahun 1970-an. Berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik yang lebih kritis dan keras dari *The Critical Legal Studies Movement* (CLS), karena pemerintah dianggap lebih cenderung kembali pada paradigma positivisme.

Dalam perkembangan ilmu hukum, *Critical Legal Studies* (CLS) bisa disebut sebagai penyejuk bagi dahaga para ilmuwan hukum, yang gerah dengan merajalelanya positivisme hukum. CLS berangkat dari pemikiran sederhana, yang mencoba bersikap kritis terhadap realitas supremasi hukum, yang mandeg hanya pada prinsip legalitas.

Critical Legal Studies banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran kritis, mulai dari Marxis, Neo Marxis, Strukturalisme, Post Strukturalisme, dan pemikir Madzhab Frankfurt lainnya. Bila ditelusuri dalam sejarah, kata kritis sudah mulai dipakai semenjak masa *Renaissance* (1350-1600), yaitu tradisi untuk melawan kungkungan penafsiran Gereja. Pasca *Renaissance* (masa

aufklarung di Abad ke-17 dan 18), dan satu abad setelahnya, lahirlah beberapa filsuf yang dipandang sebagai filsuf kritis seperti Kant, Hegel, dan Marx.



Kant dengan pikiran kritisnya mencoba membalikan kondisi pemikiran yang sudah mengakar, dengan mempertanyakan *the conditions of possibility* dari pengetahuan itu sendiri, yang telah mengakar menjadi dogma. Melalui pemikiran tersebut, ia mendekonstruksi dogmatisme yang ada pada saat itu. Selanjutnya, pemikiran Kant tersebut, mendapat kritik dari Hegel. Menurutnya, rasio Kant tidak mengenal prinsip-prinsip waktu dan netralitas, sehingga ahistoris.

Sikap kritis itulah yang melatarbelakangi pemikiran Hegel yang bersifat dialektis secara historis. Sampai pada kesimpulan, kritis adalah refleksi atau refleksi diri atas rintangan-rintangan, tekanan-tekanan dan kontradiksi-kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri rasio dalam sejarah. Tidak tinggal diam, Marx pun memberikan kritik pada pemikiran Hegel.

Marx menganggap kritis menurut Hegel terlalu idealis dan "melangit", baginya hal itu perlu dibuat materialis, yakni "dibumi"-kan. Sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya kritis berarti usaha-usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Marx ini dikembangkan oleh Frankfurt. Sehingga seringkali disebut sebagai Neo Marxisme atau Marxisme Kritis. Menurut Habermas, Frankfurt telah terjebak dalam logika buntu terhadap upaya melakukan perubahan struktur secara radikal, sehingga pilihan yang ada hanyalah bergelayut antara jalan kekerasan atau menunggu gerhana matahari. Menurut Habermas, perubahan harus dimulai dengan dialog-dialog emansipatoris yang melalui jalan komunikasi, dan bukan dominasi.

Pemikiran-pemikiran kritis tersebut memberikan pengaruh pada pola pemikiran CLS di Amerika. Sehingga dikenal adanya tiga aliran CLS; *Pertama*, Roberto M. Unger, yang mencoba terus mengintegrasikan dua paradigma yang bersaing antara paradigma konflik dan konsensus. *Kedua*, adalah David Kaiys yang sangat Marxian, dalam artian mengkritik tradisi hukum liberal yang

hanya dianggap sebagai pelayan kaum kapitalis. *Ketiga*, Eklektis, yang membaurkan prinsip-prinsip strukturalisme dan neo-Marxis. Ketiga model tersebut menunjukkan satu upaya yang sungguh-sungguh dari para ahli untuk membuat konsep perubahan. Menentang kemandegan untuk mencapai sebuah hukum yang selaras dengan realitas masyarakat.

(Kritis)nya pendidikan hukum

Dalam upaya perbaikan hukum nasional, peran pendidikan hukum sangatlah menentukan. Institusi pendidikan hukum, yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam tatanan dan sistem hukum penduduk asli di kepulauan nusantara. Harus disadari, pendidikan hukum dan profesi hukum, adalah merupakan invensi dari peradaban Eropa Barat. Sehingga implikasinya, hukum yang berkembang di Indonesia hanyalah satu kelanjutan dari apa yang dipraktekan oleh para kolonial. Yang merupakan warisan dari tata hukum sebelum Perang Dunia ke II.

Sistem hukum yang diwariskan oleh para kolonialis tampaknya telah membuahakan pemikiran-pemikiran positivistik pada ahli hukum, dan aparat hukum di negeri ini. Tentunya ini karena didukung oleh pendidikan hukum yang tidak kritis dan kreatif. Akibatnya *out put* yang dihasilkan adalah, orang-orang yang terkungkung dalam alam pikiran bahwa hukum hanya sekedar prosedural-prosedural yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang. Sehingga, dalam penegakan hukum, aparat hukum hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi malah mengorbankan kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat.

Oleh karenanya, diperlukan satu refomasi hukum secara menyeluruh, yakni meliputi struktural, substansi dan *culture*. Sehingga terbentuk satu tatanan hukum yang selaras dengan realitas masyarakat, dan menyerap aspirasi-aspirasi rakyat Indonesia. Karena perlu disadari, bahwa dengan keragaman bangsa ini, terdapat pula aturan-aturan yang ditaati, dan tumbuh berkembang di masyarakat. Misalnya : hukum adat, dan hukum tidak tertulis lainnya.

Bersambung ke hal 18



REALITA PENDIDIKAN HUKUM KONSERVATIF

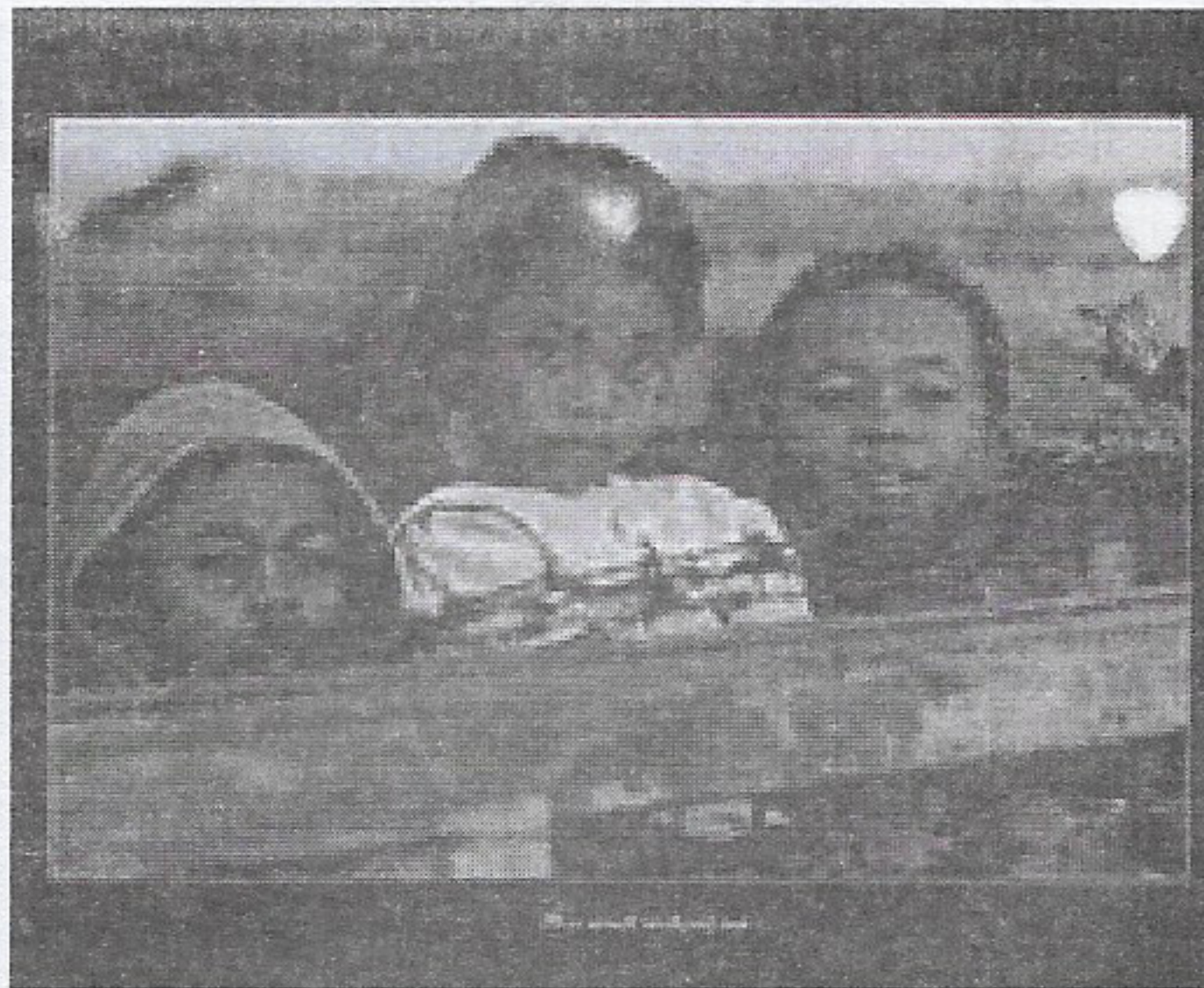
"Education makes man a right thinker and a correct decision maker. It achieves this by bringing him knowledge from the external word, teaching him reason, and acquainting him with past history, so that he may be a better judge of the present...." (Maulana Wahiduddin Khan)

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam usaha manusia mencapai tahap pembebasan dari segala belenggu kebodohan. Pendidikan dapat diibaratkan sebagai meditasi yang mendorong manusia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu yang cantik. Sayangnya di negeri ini sistem pendidikan yang diciptakan terkadang menjadi sarana pembodohan. Anak-anak negeri ini dipaksa menerima pendidikan dengan tekanan dan doktrin paksaan. Sarana pencerahan telah berubah menjadi sarana pembelengguan. Melalui sistem UAN, pembelajaran satu arah, doktrin guru yang selalu benar, guru adalah orang suci, menghasilkan lembaga sekolah yang feodal. Tentu saja dengan sistem feodal tersebut bibit-bibit yang dihasilkan adalah manusia-manusia penerus warisan penjajah yang bermental feodal. Parahnya merekalah yang menduduki posisi-posisi penting di negeri ini. Tidakkah mengherankan bila negeri yang mempunyai sumber daya alam strategis menjadi negeri miskin tukang utang.

Hukum yang seharusnya menjadi ujung tombak eksistensi tegaknya keadilan di negeri ini pun mempunyai masalah yang tidak jauh berbeda. Pendidikan hukum di negeri ini masih jauh dari konsep ideal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pendidikan hukum di Universitas di Indonesia yang masih bermasalah. Feodalisme masih merekat erat dengan pendidikan hukum di negeri ini. Terkadang keadaan ini diperparah dengan mahasiswa yang hanya bisa setuju dan tidak kritis yang malah menganggap dosen seperti dewa. Fenomena yang seperti kungkungan ini masih dapat ditemui pada kebanyakan mahasiswa hampir di semua Perguruan Tinggi di negeri ini dan parahnya paham tersebut ditularkan ke generasi selanjutnya.

Polemik transfer pengetahuan dan kurikulum masih menjadi tema utama. Buktinya, masih terdapat dosen-dosen konservatif yang menganggap kebenaran hanya berasal dari satu atau dua buku yang dibacanya. Ekstrimnya harus sesuai titik komanya dengan buku tersebut. Dengan kata lain menghilangkan perbedaan pendapat mahasiswa yang mempunyai sisi pandang yang berbeda dengan dasar argumen yang kuat disertai pendapat ahli. Hasilnya, esensi kuliah pun semakin hilang. Kuliah hanya menjadi rutinitas untuk memenuhi minimal presensi sebagai syarat mengikuti ujian. Perdebatan di kelas yang dapat memancing kekritisian terhenti, digantikan kekakuan mencatat segala pernyataan dosen dengan sifat konservatif text book.

Kesalahan sistem tersebut sebenarnya merupakan salah satu segi dari penindasan. Menurut Paulo Freire, paling tidak ada dua tipe orang tertindas. Pertama, mereka mengalami alienasi dari diri dan lingkungannya. Mereka tidak bisa menjadi subjek otonom, tetapi hanya mampu mengimitasi orang lain. Kedua, mereka mengalami self-depreciation, merasa bodoh tidak mengetahui apa-apa. Kesalahan ini terjadi di Indonesia. Dengan sumber daya pendidikan yang ada termasuk di pendidikan hukum masih ditemukan hal-hal yang dapat menghambat daya kritis dari mahasiswa. Tidakkah mengherankan, lulusan yang dihasilkan selama ini tidak dapat berbuat banyak dalam progresifitas bangsa. Lulusan fakultas hukum yang tidak mempunyai idealisme, egois, merasa benar sendiri, dan feodal masih banyak ditemukan di negeri ini. Hasilnya dapat terlihat pada pejabat-pejabat hukum di negeri ini. Ketidakhadiran Ketua (Makamah Agung) untuk menjadi saksi di pengadilan dengan alasan jabatannya sebagai Ketua MA merupakan tanda masih mengakarnya gaya-gaya feodalisme di aparat penegak hukum di negeri ini. Bukanlah suatu hal yang mengherankan, dengan gaya pendidikan



semacam itu korupsi dan budaya "Asal Bapak Senang" belum dapat dihilangkan dari negeri ini.

Parahnya lagi, pendidikan hukum yang mengajarkan pada pendekatan etik kritis tidak ditanamkan secara baik. Hal tersebut menjadikan generasi hukum terjebak dalam positivisme yang tidak melihat faktor dan sebab lain selain kesesuaian pada teks undang-undang. Nilai tersebut ditanamkan melalui sistem pembelajaran yang konservatif. Selain itu, situasi fakultas-fakultas hukum di negeri ini yang memisahkan para calon penegak hukum dengan kondisi riil masyarakat miskin di negeri ini memperparah keadaan. Mahasiswa fakultas hukum seakan-akan

berada di negeri awang-awang. Pelarangan masyarakat umum mengakses perpustakaan sampai pedagang kecil yang dilarang berjualan di wilayah FH merupakan bukti nyata adanya pemisahan tersebut. Alasan yang diungkapkan pun tidak jauh-jauh dari argumen demi keindahan fakultas hukum. Padahal, menurut Ali Syariati keindahan di dunia banyak yang dibangun dengan penindasan.

CLS dan Perennialisme sebuah tawaran solusi

Proses pembangunan pendidikan hukum yang ideal di negeri ini sebenarnya bukanlah suatu utopia bila ada keinginan yang serius dari pengambil kebijakan. Studi tentang adanya pendidikan hukum kritis atau populernya disebut Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan pendidikan hukum di negeri ini. Melalui CLS, pembelajaran hukum di buat agar kritis terhadap mazhab positivis yang jadi mainstream saat ini. Selain itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui pendekatan Positivis melainkan turut pula ditekankan pendekatan sosiologis. Melalui budaya kritik yang akan menghasilkan suasana dialektika yang sehat sifat-sifat feodalisme pada sistem maupun pendidik akan terkikis.

Perennialisme pendidikan hukum merupakan solusi lain menciptakan sebuah konsep pendidikan hukum yang ideal. Menurut Huston Smith, Perennialisme berangkat dari nilai-nilai kearifan sebagai kritik atas sains dan modernitas dengan berpegang teguh pada "dimensi agung" sebagai upaya menyempurnakan identitasnya sebagai manusia. Melalui perennialisme menurut Akhmad Efendi kebutuhan etik akan terpenuhi. Pendidikan hukum yang selama ini dipandang mengesampingkan moral dan seakan-akan pendidikan hanya untuk menghasilkan pekerja-pekerja untuk memenuhi pasar akan terjawab. Dengan kata lain kritik bahwa : fakultas hukum saat ini hanya dapat melahirkan pengacara-pengacara artis dan pekerja-pekerja perusahaan akan terjawab. Akan tetapi, semua kembali pada kemauan untuk mewujudkan berbagai konsep karena wacana tanpa realisasi bagaikan "motor tanpa bensin". (***)

Lakso Anindito
(Mahasiswa Fakultas Hukum UGM)



Belajar Kritis Untuk Masa Depan Hukum Kritis

Oleh: Zainal Arifin Muchtar

"Masa depan kemanusiaan tergantung pada adanya sikap kritis dewasa ini..."
(Max Horkheimer)

Di ranah ilmu hukum, Critical Legal Studies (CLS) adalah penyejuk bagi dahaga para ilmuwan hukum yang gerah dengan merajalelanya positivisme hukum. Positivisme hukum berangkat dari penggunaan paradigma hukum liberal yang secara ideologis meyakini bahwa hukum itu dapat dikelola dan dikonstruksi dalam suatu institusi yang normal dan terlepas sama sekali dari ilmu politik. Pandangan ini berasal dari kaum positivistik yang normologis. CLS kemudian berangkat dari pemikiran sederhana yakni kritis terhadap realitas supremasi hukum yang mandeg hanya pada prinsip legalitas.

Teori kritis yang melatarinya CLS adalah tersebar pada beberapa analisis. Yakni tradisi pemikiran Marxisme, Strukturalisme dan Mazhab Frankfurt. Namun, jika dikerucutkan maka ketiga tradisi ini lahir dari logika berfikir Immanuel Kant dan Hegel yang kemudian dikritisi secara baik oleh Jurgen Habermas. Tiga tokoh inilah yang menjadi 'dewa-dewa' utama dalam pemikiran Mazhab Frankfurt yang terkenal dengan tradisi kritis terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat modern, seperti seni, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, kebudayaan dan juga pemikiran-pemikiran hukum. Selain itu, dalam hubungan tertentu, Mazhab Frankfurt juga sesungguhnya merupakan pemikiran kritis terhadap logika dan pemikiran Karl Marx, karenanya sering dikatakan bahwa Mazhab Frankfurt adalah kelanjutan pemikiran Marx di Barat yang kemudian banyak dikenal sebagai Marxisme Kritis atau Neo Marxisme. Di dalam dunia hukum itu sendiri Critical legal studies (CLS) merupakan penyejuk bagi para ilmuwan hukum yang gerah dengan merajalelanya positivisme hukum. Positivisme hukum berangkat dari penggunaan paradigma hukum liberal yang secara ideologis meyakini bahwa hukum itu dapat dikelola dan dikonstruksi dalam suatu institusi yang normal dan terlepas sama sekali dari ilmu politik.

Teori-Teori Kritis

Secara sederhana, sejarah menuliskan bahwa Immanuel Kant adalah pemicu awal pemikiran kritis ini yang kemudian dikritisi oleh Hegel. Kedua pemikiran ini pun kemudian juga dikritisi oleh Jurgen Habermas. Sesungguhnya, kata kritis sudah mulai dipakai di masa Renaissance (1350-1600) yang bertradisi untuk melawan kungkungan penafsiran Gereja. Pasca renaissance (masa aufklarung di Abad ke-17 dan 18) dan satu abad setelahnya, lahirlah beberapa filsuf yang dipandang sebagai filsuf kritis seperti

Kekritisan Kant diakui ketika dia tiba-tiba membalikkan kondisi pemikiran yang sedang laku saat itu dengan mempertanyakan the conditions of possibility dari Kant, Hegel dan Marx. pengetahuan itu sendiri. Ia menyusun logika-logika rasio kritisisme yang pada saat itu menjadi lawan terhadap dogmatisme. Hegel kemudian datang dengan dengan kritik yang berbeda dari Kant. Rasio yang diusung oleh Kant, dikritisi oleh Hegel bahwa rasio semacam itu tidak mengenal prinsip-prinsip waktu dan netralitas, sehingga ahistoris. Inilah yang kemudian melatari perkembangan pemikiran Hegel yang dialektis secara historis. Walau menganalisis Kant, namun Hegel-lah yang kemudian untuk pertama kali sampai pada artian kritis yang sesungguhnya yakni kritis adalah refleksi atau refleksi diri atas rintangan-rintangan, tekanan-tekanan dan kontradiksi-kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri rasio dalam sejarah. Simplifikasinya, kritis adalah negasi atau dialektis.

Tidak hanya sampai disini, Marx kemudian datang dengan mengkritisi lagi konsep Hegel yang menempatkan konsep kritis dalam artian idealisme. Bagi Marx, hal itu seharusnya bersifat materialisme. Artinya, konsep 'melangit' gaya Hegel kemudian di-'bumi'-kan oleh Marx dengan menempatkannya dalam konteks sejarah yang kongkret dari masyarakat yang nyata. Kritik dalam

konteks materialisme sejarah ini berarti praxis revolusioner yang dilakukan oleh kaum proletariat atau perjuangan kelas.

Karenanya, kritis berarti usaha-usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan kekuasaan di dalam masyarakat.

Pengkajian Marx yang dilakukan oleh Mazhab Frankfurt menjadi neo-Marx. Walau sebagai neo-Marx, tetapi aliran Mazhab Frankfurt tetap tergoles tak berdaya di hadapan logika-logika Kant, Hegel dan Marx. Dalam istilah Habermas, Mazhab Frankfurt telah terjebak dalam logika buntu terhadap upaya melakukan perubahan struktur secara radikal, sehingga pilihan yang terjadi hanyalah bergelayut antara 'jalan kekerasan' atau menunggu 'gerhana matahari'. Menurut Habermas, perubahan harus dimulai dengan dialog-dialog emansipatoris yang melalui jalan komunikasi dan bukan dominasi.

Sedikit-banyak, ide-ide kritis inilah yang masuk ke Amerika dan mempengaruhi pola pemikiran CLS. Ditambah dengan pemikiran strukturalisme yang memiliki ciri khusus totalitas (totality), transformatif (transformative) dan mengatur diri sendiri (self regulating), maka setidaknya ada 3 aliran kuat dalam CLS di Amerika, yakni pertama adalah arus pemikiran yang diwakili Roberto M. Unger yang mencoba terus mengintegrasikan dua paradigma yang bersaing antara paradigma konflik dan konsesus. Kedua, adalah David Kaiyrs yang sangat Marxian dalam artian mengkritik tradisi hukum liberal yang hanya dianggap sebagai pelayan kaum kapitalis. Ketiga adalah Eklektis yang membaurkan prinsip-prinsip strukturalisme dan neo-Marxis.

Variasi mazhab CLS di Amerika itu sendiri telah menjadi contoh betapa sulitnya menemukan metodologi yang pas untuk satu tujuan utama yakni proyek perubahan. Sehingga tawaran untuk kohesi ketiga kemungkinan itu masihlah pada tataran kombinasi dari metode-metode tersebut.

Pendidikan Hukum Kritis Di Indonesia

Pertanyaannya adalah bagaimana di Indonesia? Sesungguhnya, sangat tidak bijaksana jika hanya mencangkok mekanisme CLS ke dalam sistem Indonesia tanpa dipoles, apalagi dengan begitu saja menginjeksikannya ke dalam kurikulum Indonesia. Jikalaupun dimasukkan ke dalam kurikulum Indonesia, maka akan membuka pertanyaan besar yakni unsur apanya yang akan dicangkokkan? Mengenal CLS atau semangat kekritisannya?

Saya lebih memilih pada wilayah kedua. Pendidikan harus mampu membawa kemampuan dan semangat untuk kritis. Ketika mekanisme pendidikan telah mampu mengadopsi sistem kritis ini, barulah kita bisa beranjak pada pendidikan hukum kritis yang berbicara pada meraba kemungkinan metodologi ilmu hukum kritis ala Indonesia. (***)





Pembunuhan Peradilan Yang Bersih

Oleh : Aditya Nugraha Iskandar (Anai)

Palu godam telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi(MK) terhadap pengujian UU No 22 Tahun 2004(UUKY) tentang pasal pengawasan dalam Bab III pasal 22 dan pasal 20 ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan usul "penjatuhan sanksi" yang diatur dalam pasal 21, pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5), pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan bab I pasal 1 butir 5 Undang-undang tersebut. Keputusan kontroversial kembali dihasilkan oleh MK. Mungkin kita masih ingat keputusan MK yang membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang membuat para koruptor tidak dapat dijerat melawan hukum secara materiil. Mahkamah Konstitusi kali ini membatalkan pasal-pasal pengawasan dalam UUKY yang merupakan senjata memberantas mafia peradilan. Pasal-pasal tersebut dianggap merugikan para Hakim Agung dalam melaksanakan kemandirian kehakiman, serta bertentangan UUD 1945. Alasan ini sangat tidak relevan dan cenderung dibuat-buat atas dasar perasaan hati para Hakim Agung yang tidak ingin diawasi.

Jika kita melihat lebih jauh sesungguhnya pasal-pasal pengawasan dalam UUKY bermaksud ingin menjelaskan pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi "**Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim**". Kata hakim disini menimbulkan tafsir masing-masing antara Komisi Yudisial dengan para hakim. Hakim Agung dan Hakim konstitusi berpendapat bahwa kata "hakim" dalam pasal itu tidak termasuk Hakim Agung dan Hakim konstitusi karena kedua hakim itu merupakan hakim ad hoc. Akan tetapi kita melihat bahwa kata hakim dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ditulis dengan huruf kecil bukan dengan huruf besar. Hal ini berarti bahwa hakim di pasal tersebut memiliki pengertian yang luas, sehingga mencakup hakim agung dan hakim konstitusi. Jika kita membaca pasal tersebut pada awal kalimat terdapat kata hakim agung pada kalimat "**pengangkatan hakim agung**" maka secara logika kata hakim dalam kalimat akhir tertuju pada hakim agung.

Kemudian jika kita melihat pengertian secara harfiah, hakim adalah orang yang memimpin proses peradilan, sedangkan hakim agung juga merupakan pemimpin proses peradilan dalam tingkat kasasi, maka sudah secara wajar hakim agung juga merupakan objek pengawasan Komisi Yudisial. Hakim konstitusi juga memimpin proses peradilan dalam hal *judicial review* maka juga termasuk hakim dalam pengawasan Komisi Yudisial. Tapi yang perlu kita ingat juga kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan, tidak boleh menyangkut ruang lingkup hasil keputusan karena Komisi Yudisial bukan lembaga peradilan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi kali ini juga tidak lepas dari konflik kepentingan (*Conflict of interest*), dalam hal Hakim konstitusi disini tidak ingin diawasi oleh Komisi Yudisial. Hakim Konstitusi seakan lupa pada asas *nemo iudex in propria causa* (tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri). Hakim konstitusi telah menyampingkan

asas dalam hukum acara (*due process*). Bahkan dalam pasal 29 ayat (5) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *seorang hakim atau penitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri atau permintaan pihak yang berperkara*. Maka sudah sewajarnya secara professional Mahkamah Konstitusi menolak menyelesaikan perkara yang menyangkut kepentingannya, demi menjaga imparialitas. Bahkan Deni Indrayana, S.H.,L.L.M.,Phd (Dosen Hukum Tata Negara UGM / Direktur ICM) berkata "Sesungguhnya MK harus mundur dalam masalah ini jika MK mempunyai kepentingan dalam perkara ini".

Jika kita melihat secara jelas pokok permasalahan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara ini juga patut kita pertanyakan. Dalam pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi dijelaskan wewenang MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu)
5. MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak Pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Dalam perkara ini terlihat jelas bahwa terjadi pengujian UU KY terhadap UU lain bukan terhadap UUD 1945. Secara tersirat UUKY dianggap bertentangan dengan UU tentang kekuasaan kehakiman, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian telah terjadi

legislative review (karena ketentuan pengawasan hakim ada dalam 3 aturan) bukan *judicial review*. Dalam hal *legislative review* yang berwenang adalah DPR sebagai pemegang kekuasaan legislative bukan Mahkamah Konstitusi. Hegemoni Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga lain menciderai tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai penjaga Konstitusi malah menjadi penjagal Konstitusi.

Putusan ini pun dirasa tidak mencerminkan keadilan. Setelah putusan ini maka siapakah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?. Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi seakan-akan mencul menjadi lembaga yang tidak tersentuh. Hal ini tentu menodai semangat *checks and balances* (saling kontrol dan saling imbang) antar lembaga negara. Setelah pasca amandemen UUD 1945 antar lembaga negara dituntut untuk saling mengawasi agar tidak terjadi *absolutisme kecil* dalam masing-masing lembaga negara. Theory pemisahan kekuasaan atau *Trias Politica* dapat memunculkan absolut-absolut baru pada masing-masing kekuasaan, jika tidak ada kontrol antar kekuasaan. Pasca amandemen di Indonesia DPR bisa mengontrol Presiden atau sebaliknya Presiden dapat mengontrol DPR. Begitu pula Mahkamah Agung dapat mengontrol DPR dalam mengeluarkan UU dalam proses peradilannya, sedangkan Mahkamah Konstitusi dapat mengontrol DPR dengan jalan *judicial Review*. Hal ini akan tidak adil jika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak ada yang mengontrol. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi cenderung menjadi lembaga tertinggi negara. Padahal kata lembaga tertinggi negara sudah lama kita tinggalkan dan semua lembaga negara dianggap sama kedudukannya secara theory. Jika Mahkamah Agung dan





Konstitusi cenderung menjadi lembaga tertinggi negara. Padahal kata lembaga tertinggi negara sudah lama kita tinggalkan dan semua lembaga negara dianggap sama kedudukannya secara theory. Jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berdalih telah melakukan pengawasan internal dalam tubuhnya, akan sangat tidak menciptakan peradilan yang bersih. Dalam contoh kasus penyuapan Probo Sutejo terhadap Ketua Mahkamah Agung, kasus ini memuai lalu menghilang tidak sesuai harapan. Hakim pengadilan negeri yang menangani kasus ini tidak dapat menghadirkan Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung) dalam persidangan sebagai saksi, tanpa alasan yang jelas. Dampak dari putusan ini sangat jelas, "mafia peradilan" akan makin marak, jika pengawasan internal tidak berjalan efektif. Para hakim akan semakin bersatu menciptakan kesatuan korps yang kuat, sehingga saling toleransi jika terkena masalah. Selain itu hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung akan melakukan prinsip *nrimo*, jika berurusan dengan Hakim-Hakim Agung. Karena secara

hierarkis dalam pengawasan internal Hakim Agung dinggap lebih berwenang dan putusannya mengikat serta final. Dalam permasalahan ini menurut penulis Komisi Yudisial masih dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku para hakim. Karena Pengawasan itu secara tegas diatur dalam UUD 1945 pasal 24B ayat (1). Selain itu Komisi Yudisial secara teori masih bisa melakukan revisi UU. Bahkan mungkin dapat mengubah Konstitusi (UUD 1945) walaupun secara praktek sulit untuk dilakukan. Tapi secara wajar seharusnya ada hubungan kordinasi yang harmonis antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam hal interpretasi kewenangan masing-masing. UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi tidak boleh saling bertentangan. Jika ada pertentangan maka semua UU harus diubah bersama-sama, bukan malah dijadikan senjata masing-masing. Semua lembaga harus saling menghormati demi tegaknya keadilan. (*g)

Undang-Undang

1. UU Nomor 1/2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
2. UU Nomor 2 /2006 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
3. UU Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. UU Nomor 4/2006 Tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
5. UU Nomor 5/2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
6. UU Nomor 6/2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
7. UU Nomor 7/2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
8. UU Nomor 8/2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
9. UU Nomor 12/2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia



Kang Wahyu. Siapa yang tidak kenal nama ini di kampus Fakultas Hukum UGM? Hampir setiap hari dia berjualan di lokasi parkir barat kampus, persis di depan sekretariat Dema Justicia dan ALSA. Nyaris setiap mahasiswa di FH-UGM tahu namanya, pernah berbincang, bersenda gurau, bahkan curhat mengenai berbagai macam masalah dengannya di tsiang yang terik sambil menikmati teh botol, melepaskan dahaga dan penat seusai waktu kuliah yang padat. Pribadinya hangat, terbuka pada siapa saja dan baik hati. Dia tidak keberatan ketika ada mahasiswa yang berutang, lantaran belum mendapat kiriman uang saku dari orang tua. Tidak heran siapapun yang mengenalnya menyukai pria yang sudah berjualan selama kurang lebih delapan tahun di kampus kita ini. Begitu dekatnya Kang Wahyu dengan mahasiswa, sampai ada yang bilang, "Gosip apa sih di kampus yang Kang Wahyu ngga tahu?"

Kang Wahyu juga kenal dekat dengan beberapa SKKK, *cleaning service*, karyawan administratif, bahkan dosen. "Saya kan juga sudah cukup lama berjualan disini, dosen-dosen itu sebelum jadi dosen, waktu mereka masih jadi mahasiswa juga sudah dekat sama saya, suka ngobrol-ngobrol juga," akunya, "Apalagi dosen-dosen muda itu ya, waktu mereka masih aktif di kampus dulu, sampai mereka kuliah lagi ke luar negeri ya

dan kembali mengajar di FH-UGM masih suka kesini buat ngobrol, masih ingat dengan saya." Bagi Kang Wahyu, lingkungan FH-UGM telah menjadi keluarga kedua, bukan hanya sekedar tempatnya mencari makan.

Kang Wahyu memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Hasil penjualan minuman di kampus digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga. Mulai dari membeli beras, membayar listrik, kebutuhan sekolah anak-anak, juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Pendapatan bersih dari berjualan setiap harinya memang tidak cukup banyak, namun semuanya diatur sedemikian rupa sehingga setiap Lebaran, Kang Wahyu dapat membelikan anak-anaknya baju baru selayaknya anak-anak lain pada umumnya di hari Lebaran. Padahal selama bulan puasa, dia absen berjualan di kampus dan memilih libur ketimbang *nyambi* mengerjakan pekerjaan lain. "Itu karena saya dan keluarga memiliki manajemen keuangan yang bagus, pintar-pintarnya kami sajalah dalam mengatur keuangan. Setiap dapat uang, kami bagi-bagi, yang ini untuk beli beras, untuk bayar lamputagihan listrik, untuk uang sekolah, sisanya

ditabung untuk keperluan lain," ungkapnya mengenai rahasia pengaturan keuangannya. Sebuah prinsip sederhana dalam *financial management* sebenarnya, tapi faktanya miliarder-miliarder dalam skala internasional menerapkan hal yang sama sebagai rahasia kesuksesan mereka. Bedanya hanya "jumlah angka nol" pada pendapatan mereka, dan kenyataan bahwa sebagian dari keuntungan yang mereka dapat bisa saja merupakan hasil korupsi. Kang Wahyu, dengan kejujuran dan sifat pekerja kerasnya, selangkah lebih maju.

Namun, ada hal yang cukup disesali Kang Wahyu perihal usahanya. Tidak semua orang menyukai kehadiran Kang Wahyu di kampus. Masalah perizinan. Seperti halnya pedagang lain yang cukup lama pernah berdagang di kampus kita dan mau tidak mau mereka harus hengkang karena tidak dapat memperoleh surat perizinan berjualan di kampus. Mengenai masalah perizinan ini, Kang Wahyu pernah sampai disidang lima kali oleh mereka yang memiliki cukup pengaruh dalam birokrasi kampus FH-UGM. Sidang pertama di tahun 1999, dan yang terakhir di tahun 2003. Semuanya karena masalah yang sama, lagi-lagi masalah perizinan. Menurut "para petinggi kampus" ini, yang berhak memperdagangkan makanan atau minuman di kampus hanya kantin saja, pedagang selain itu

berorganisasi atau ikut LSO cenderung lebih peka terhadap sekitarnya. Sering *nongkrong* di kampus bukannya tidak memberi manfaat. "Jangan menjadi mahasiswa yang terlalu *study oriented*, hanya mengejar IP tinggi, lulus dengan cepat, berorientasi pada gaji besar saja ketika bekerja, lalu menikah, dan seterusnya tanpa mempedulikan mereka yang butuh bantuan kita. Seorang mahasiswa harus berjiwa sosial tinggi, bahkan setelah lulus nanti," katanya lugas, "harta dan materi bukan faktor utama, kedua hal tersebut tidak cukup bisa membawa kebahagiaan. Lihat saya, keuntungan per hari yang saya dapat dari berjualan hanya sedikit, tapi keluarga saya tetap bahagia."

Sayang, pembicaraan kami harus berakhir. Banyak hal yang dapat dipelajari dari Kang Wahyu dalam perbincangan singkat ini. Filosofi-filosofi hidupnya yang sederhana. Tapi bukankah kesederhanaan sebuah bangunan justru menunjukkan kekokohan strukturnya? Confucius filsuf besar Cina, pernah mengatakan hal yang serupa. Kedekatan dan keakraban Kang Wahyu dengan mahasiswa memang nyata adanya. Rasanya memang benar, celetukan seorang kawan mahasiswa yang mempelesetkan sebuah slogan merk teh botol, "Apapun makanannya, minumannya...teh botol Kang Wahyu. (*g)



NIKMATNYA MINUM TEH BOTOL BERSAMA KANG WAHYU

"dipersilahkan" cari tempat lain. Berkali-kali Kang Wahyu mendapat surat teguran, berkali-kali pula dia hendak diusir.

Syukurlah para mahasiswa dan alumni yang pernah dekat dengan Kang Wahyu tidak tinggal diam menanggapi masalah ini. Bantuan advokasi agar dia bisa mendapatkan surat perizinan segera datang tanpa diminta, mulai dari Dema Justicia FH-UGM waktu itu ketuanya masih Dionisius Y. Pongkor, beberapa dosen yang sudah akrab dengannya, bahkan para alumni yang sudah bekerja di Jakarta. Bukti bahwa Kang Wahyu memang figur yang akrab dan disukai para mahasiswa di kampus.

"Kadang juga suka ada yang membelikan saya makan siang, walaupun dia juga suka *ngutang* kalau beli minum sama saya," katanya sambil tertawa, "malah ada alumni angkatan '91 yang membelikan TV untuk saya dan keluarga, dan pernah, saya yang seumur hidup dari lahir tidak pernah merayakan ulangtahun, tahu-tahu dirayakan dan dibelikan kue, tidak lupa dengan acara tiup lilinnya." Bagi Kang Wahyu, pelanggannya bukan sekedar pelanggan, merekalah keluarganya di kampus, keluarga kedua baginya. Dengan bantuan seorang alumni angkatan '91 juga dia bisa mendapat izin untuk berjualan di kampus, walau izin tersebut tidak bersifat kontrak tapi hanya secarik kertas berisi perjanjian biasa, antara Kang Wahyu dan kampus.

Di akhir perbincangan kami Kang Wahyu memberikan nasihat bagi mahasiswa FH-UGM, untuk selalu peduli pada lingkungan sosialnya. Dia juga berpendapat, biasanya mahasiswa yang

Svetlana Anggita Prasasthi



Nama : Wahyu Wiyono
TTL : Wonogiri, 23 Agustus 1967
Alamat : Pogungrejo, RT 15/51 Sleman
Istri : Sugiyati
Anak : Herry S, Candra S, Bayu S
Motto : Bagiku hidup ini bagai air sungai yang mengalir, ada kalanya tenang ada pula saatnya bergelombang. Seperti roda kehidupan yang selalu berputar.

Berusalahlah agar tidak tertinggal dan berdoalah agar tidak tergelincir.



Garis Lurus

Merasa ajaib, hebat, tak ternilai
Saat cinta, keagungan melekat tak terpisah
Menuntun langkah-langkah yang eraserak

Namun damai tak dapat ditipu
Oleh tetesan keringat kemunafikan
Yang deras menutupi pori-pori moral

Angkuh yang melambung
Merangsek turun

Melesat
Menghujan dan memecah rasa tinggi

Menuntu jalan lurus yang menyimpang
Atas tuntutan segala ingin
Dari garis lurus yang telah ditentukan

Lurus yang tersamar
dari lirik hidup yang tak sanggup di gubah

ACHMAD

Dalam Sebuah Tarian

Kembali aku menari-nari disini
Berjinjit gemulai tegak lurus kemudian
merendah tertahan
Merangkai gambar-gambar peristiwa langka

Masih disini, di panggung hitam putih
Meski aku berdiri dalam pijakan abu-abu
Aku harus menyelesaikan tarian ini
Karena aku tak mau resah
Akibat ending yang tergantung di udara
Melayang-layang ikuti angin yang membawanya

Masih dengan tarian dalam tubuhku
Kakiku mulai mengejang
Payah menanggung beban-beban kehidupan
Dan waktuku tak banyak lagi
Sebelum sekujur tubuhku membeku
Harus segera kuselesaikan gerakan ini
Secepatnya!
Tapi aku tak boleh lupa makna
Esensi yang ingin kuperlihatkan, kupamerkan

Sepuluh tubuhku telah mati
Tak kurasa sakit, tak kubuai nikmat
Tinggal tangan dan kepalaku yang masih
berfungsi
Menari, kanan-kiri, atas-bawah, depan belakang
Berputar melingkar, terhenti
Tinggal kepala, mata dan otak lebih tepatnya
Mulutku sudah membatu, hidungku entah kemana
Pandangan mataku sudah memudar, kabur, tak
jelas
Dan otakku mulai tak waras, sakit
Dan tarianku terhenti, padahal tinggal satu
gerakan lagi



Hukum yang (tidak) Memanusiakan Manusia...

dari hal 10

Paling tidak, hal ini dapat diupayakan dengan melakukan perubahan paradigma masyarakat hukum yang masih terkungkung dalam positivisme. Melalui penyadaran masyarakat hukum, dan pengawalan terhadap sistem, melalui gerakan-gerakan hukum kritis. Dan tentunya, hal ini harus di dukung dengan reformasi pendidikan hukum (misal :kurikulum, cara pengajaran, dll). Serta perubahan secara radikal sistem hukum yang ada. Harapannya, agar tercipta hukum yang mampu menyerap aspirasi rakyat, sesuai dengan hati nurani rakyat, berwatak responsif terhadap permasalahan rakyat, serta menciptakan keadilan, dan kemanfaatan bagi rakyat. (*w)

Kisah Pengembara dan Pak Tua...

dari hal 3

Sampai pada suatu moment, dimana kita sadar, bahwa ada yang kurang, ada yang hilang dalam sistem pendidikan kita. Berbagai kurikulum dibangun. Sistem baru. Dengan variasi bungkus, subtransi dan teknis pelaksanaan. Mulai dari kurikulum 1994, diganti lagi kurikulum 1998, kurikulum berbasis kompetensi, dan seterusnya. Satu demi satu diklaim sebagai perbaikan dari kurikulum yang lalu.

Dan, kita masih terus saja merasa menemukan, tanpa tahu secara pasti, apa yang hilang.

■

Agaknya, ini juga yang terjadi pada kurikulum kita. Kurikulum pendidikan hukum. Ilmu hukum yang sudah dogmatik, dirangkum lagi menjadi jenis pengetahuan yang mempunyai objek kajian kasus tertentu dan diselesaikan secara praktis lewat sejumlah pasal dalam peraturan hukum positif. Penemuan dan hermeutik-penafsiran-atasnya berjalan secara fungsional, sekedar mengurai kasus. Sehingga beberapa mata kuliah hanya membentuk individu yang pandai menghafal pasal-pasal. Sampai nglothok, kata orang Jawa. Ditambah dengan rendahnya intensitas diskusi ilmiah antar dosen, dosen dengan mahasiswa, maupun di kalangan mahasiswa sendiri, semakin membuat pendidikan hukum kita terpuruk.

Belum lagi kita temukan, apa yang hilang dari kurikulum pendidikan lama-hingga diganti yang baru- sekarang telah dibuka program D3 Ilmu Hukum di kampus kita ini. Sungguh menggelikan. Dengan pertimbangan bahwa kondisi di lapangan, para sarjana ilmu hukum tidak mampu mengerjakan ranah teknis hukum. Serta menjadi para legal yang bisa mendampingi masyarakat awam ketika beracara. Sebagian besar mata kuliah adalah praktek. Peduli apa dengan subtransi. Alih-alih menghasilkan seorang teknokrat, ini lebih parah, yang lahir adalah seorang teknis. Padahal ada subtransi keilmuan disana, dilupakan begitu saja. Bahwa harus ada logika berfikir yang jelas, runtut dan logis pada diri seorang mahasiswa hukum. Harus, karena hukum bukan hanya masalah mengetuk palu, namun juga masalah pikir dan rasa. Orang yang tahu dan mengerti, akan membawa hukum pada sebuah wilayah khusus keilmuan. Bukan memperdebatkan pasal, dimana apa yang seharusnya ditegakkan malah jadi terpinggirkan. Mereka, mahasiswa itu, tidak akan tahu benar bagaimana pandangan sosiologi Pierre Bourdieu, atau Unger misalnya ketika menghadapi masalah hukum. Kabur mengenai, bagaimana mempertimbangkan suatu wilayah persoalan, bagaimana kondisi dari adanya persoalan tersebut, harga yang harus dibayar. Sehingga mampu menyatakan apa pengaruh dari objek-objek tertentu, atas subjek tertentu pula. Kenyataannya tidak. Yang mereka dapatkan

adalah bagaimana, lidah menjadi alat menarik pasala-pasal, bagaimana tangan menuliskan tuntutan-tuntutan. Peduli apa dengan latar belakang dan kondisi riil. Lupa akan adanya *raison d'être* dari hukum. Conflict of human interest. Konflik untuk memperebutkan keadilan. Keadilan yang substansial. Bukan hanya pemenuhan asas kepastian hukum semata. Kalau memang praktik-praktik kepengacaraan kita kurang, mengapa tidak memaksimalkan mata kuliah PLKH? Atau mengkaji lagi, jangan-jangan ada yang salah dalam proses penyampaianannya itu sendiri. Atau kita, mahasiswanya, yang sudah menjadi robot dari kurikulum pendidikan? Sehingga memilih menjadi pragmatis, yang penting cepat lulus, dan bekerja. Wong kata orang, sekarang itu zaman edan, kalau tidak ikut edan tidak kebagian. Wah. Ternyata, kita masih perlu banyak muhasabah. Introspeksi diri.

Kita disini adalah, saya, anda, mereka, serta beliau.

Ini penting, selama kita masih terkait dengan institusi yang akan melahirkan ahli-ahli hukum masa depan, namun kondisi pembelajaran kita tidak membebaskan, ya sudah, mari kita tunggu Godot muncul, berharap hukum kembali tegak. .

■

Inilah mengapa kisah Pak Tua dan Pengembara ini saya tawarkan sebagai kiasan bagi pendidikan hukum kita.- sayangnya, mencoba mengurai sebab, selalu saja disalahpahami dengan tuduhan mencari-cari masalah, tukang kritik yang tidak solutif. Bagaimana mungkin kita berada di balik topeng solusi dengan cara seperti itu? Sepertinya kita lupa, bahwa pasti ada sebab, ada sejarah. Alur yang harus diikuti. Ada kontinuitas-

Hikayat yang saya nukil diatas, menurut saya, adalah alegori yang pas bagi kebanyakan kebiasaan kita. Manusia yang rumit. Sulit dimengerti, bahkan oleh dirinya sendiri. Kisah seorang pengembara yang gelisah. Yang tak pernah tenang berada di tempatnya karena keinginan untuk selalu mencari. Hingga akhirnya dia berada di sebuah titik balik, dimana ia terjebak pada pikirannya sendiri. Merasa telah mencari dan tahu banyak hal, padahal ia tidak mengerti, apa yang telah hilang. Jika memang masih ada kurang-kurang dari proses yang sudah ada, mengapa tidak kita cari apa yang kurang, apa yang hilang. Bukannya langsung mencari alternatif baru, lantas diklaim sebagai solusi. (***)

Gitra Putri Prasasti Praja
Pemimpin Redaksi

Seputar Workshop

"Critical Legal Studies"

Bertempat di Jogjakarta Plaza Hotel, *workshop* ini mencoba mengajak para partisipannya para mahasiswa fakultas hukum yang tersebar di berbagai universitas di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menggebrak kurikulum hukum yang sudah lama dijalankan di hampir semua fakultas hukum se-Indonesia. Kurikulum yang dinilai mulai kurang efektif untuk diimplementasikan, mengingat perkembangan yang terjadi saat ini. Kurikulum pendidikan hukum yang positivis.

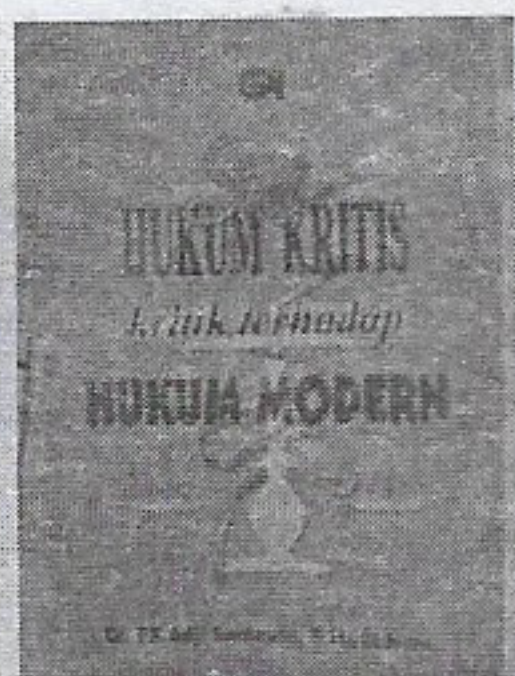
Workshop yang terselenggara atas kerjasama BPPM MAHKAMAH dan HuMA ini merupakan lanjutan dari diskusi terbatas di Universitas Diponegoro Semarang "Menggagas *Critical Legal Studies* sebagai Alternatif" dan menghasilkan gagasan bahwa wacana ini perlu dikampanyekan dengan media yang lebih besar. Di awal, peserta sudah diajak sedikit *brainstorming* dengan sebuah pertanyaan: Konsep CLS seperti apa yang sesuai untuk diterapkan di perguruan tinggi, terutama di fakultas hukum di Indonesia? Bagaimana tindak lanjutnya?

Adapun pembicara-pembicara dalam *workshop* ini tentunya bukan sembarang pembicara. Zainal Arifin Mochtar Husein, S.H., L.L.M. dosen bagian HAN FH-UGM, Dr. Sudjito, S.H., Ms juga dari FH-UGM, Irsyad Thamrin, S.H. dari Pusham-UII, dan B. Steny, S.H. Mereka adalah orang-orang, akademisi maupun praktisi hukum yang merasa prihatin dengan kurikulum pendidikan hukum positivis yang sejak lama sudah ditawarkan dan diimplementasikan di perguruan tinggi, namun sebenarnya sudah tidak efektif untuk menjawab persoalan-persoalan krusial dalam menghadapi *the real society in the real world*, masyarakat sesungguhnya di dunia nyata. Kurikulum positivis yang mengajarkan hukum, tapi tidak mengajarkan mahasiswa untuk bersikap kritis. Tradisi yang tidak memanusiakan manusia, dengan mematikan kreatifitas dan kepedulian sosial, melahirkan intelektual dan praktisi hukum yang apatis dan hanya sekedar mencari keuntungan pribadi. *That's why all people say, all lawyers go to hell.*

Tiap-tiap pembicara menyampaikan pendapat mereka tentang urgensi perlunya wacana *Critical Legal Studies* dan Hukum Progresif dikembangkan, mulai dari sejarah CLS itu sendiri sampai bagaimana sebaiknya CLS diimplementasikan di kampus, tentunya dengan perspektif yang berbeda-beda. Justru hal ini yang menarik, karena menjadikan suasana diskusi lebih hidup dan interaktif antara satu sama lain.

Workshop yang berlangsung selama satu hari ini diakhiri dengan pemberian nama forum dengan lebih resmi yaitu Forum Masyarakat Hukum Kritis, yang mempunyai misi sebagai berikut: pemilihan koordinator masing-masing cabang universitas, sosialisasi *draft*, mengkampanyekan CLS kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum se-Indonesia, membuat komunitas diskusi CLS, tukar-menukar informasi lewat maillist, penyisipan CLS pada mata kuliah, diskusi terstruktur, dan berbagi literatur mengenai CLS. Puncaknya adalah penandatanganan deklarasi mahasiswa hukum progresif oleh setiap anggota forum tersebut.

Diakhiri dengan secangkir kopi hangat yang disediakan pihak Jogjakarta Plaza Hotel, terbersit harapan, agar peserta dapat mensosialisasikan CLS dan hukum progresif di kampus masing-masing, demi menciptakan sebuah esok yang lebih baik. Walau dimulai dari sebuah hal kecil sekalipun. (***)



Prosedur Hukum yang Menelanjangi Keadilan Substansial

Secara sistematis, isi buku ini dibagi dalam empat bab. Bab I yang berjudul "Dominasi Paradigma Positivisme dan Pengaruhnya pada Hukum Modern", membahas tentang lahirnya sistem hukum modern yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme. Dalam bab ini dibahas tentang kajian kritis terhadap prinsip-prinsip netralitas, objektivitas, dan imparialitas. Bab II yang berjudul Kapitalisme dan Pengaruhnya pada Pertumbuhan Hukum Modern, memaparkan bahwa ada keterkaitan antara tatanan sosial kapitalisme (sebagai teori yang dipraktekkan dalam bidang ekonomi) dan perkembangan saintifikasi hukum modern.

Selanjutnya uraian dalam Bab III berjudul "Kritikal Teori: Kritik terhadap Positivisme". Dalam pembahasannya penulis ingin menunjukkan bahwa kajian kritis ini dipedomani oleh paradigma *critical theory* yang secara garis besar mengembangkan kritik terhadap paradigma positivisme. Paradigma inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan tesis-tesis dalam studi hukum kritis untuk melakukan kritik terhadap sistem hukum modern sebagaimana tertuang dalam Bab IV.

Studi Hukum Kritis pada dasarnya mengembangkan pemikiran dan ajaran untuk menentang atau paling tidak meninjau kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum, dan implementasinya. Dalam teori ilmu hukum pun ada ajaran yang substansinya justru mengkritisi, baik ajaran atau norma hukum yang mungkin selama ini telah diterima sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan.

Mulanya aliran positivisme diciptakan untuk mengawal sistem ekonomi kapitalis. Demi mencapai kepastian hukum, dimana manusia dapat dengan bebas berekonomi asalkan tidak melanggar hak-hak orang lain. Karl Marx mengatakan bahwa dalam kapitalisme hanya mengakui satu hukum, yaitu hukum tawar-menawar di dalam pasar. Sedangkan nilai yang ingin dicapai oleh peserta pasar adalah nilai tukar dan bukan nilai pakai. Artinya, orang membeli atau memproduksi sesuatu bukan karena mau menggunakan, tetapi ingin menjualnya kembali dengan keuntungan yang setinggi mungkin. Makin banyak keuntungannya makin kuatlah kedudukan pasar. Proses-proses produksi ekonomi yang bersifat kapitalis itu memerlukan sebuah tatanan sosial

yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses ekonomi dapat berlangsung baik. Tuntutan yang paling mendesak pada saat itu adalah terciptanya suatu sistem hukum formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi dan dapat dimasukan dalam kalkulasi ekonomi. Kemudian untuk menunjang sistem kapitalis tersebut berkembanglah aliran hukum positivisme atau sistem hukum modern (*the modern legal system*). Namun dalam prakteknya keberadaan hukum yang seharusnya mendukung kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai pembentuk hukum, malah dijadikan instrumen oleh orang-orang yang ekonominya mapan untuk menekan masyarakat ekonomi menengah sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya.

Teori hukum kritis berkembang untuk menjawab segala persoalan yang tidak terselesaikan oleh sistem hukum modern (positivisme). Teori ini dibangun oleh *Frankfurt school* (mazhab Frankfurt), bahwa ilmu pengetahuan dalam perkembangannya dipengaruhi oleh *mythos scientific* atau *mythos positivistic*, yang ternyata hanya membelenggu harkat dan martabat manusia. Perkembangan rasionalitas tidak lagi mengabdikan pada praksismoral, tetapi terdominasi oleh rasio-instrumental. Selanjutnya dominasi ini akan di manipulasi oleh manusia untuk memanipulasi manusia yang lain. Rasio instrumental akan membawa masyarakat menjadi rasional yang akan menyembunyikan sifat irasionalnya.

Doktrin-doktrin hukum yang selama ini diilhami oleh paradigma positivisme, baik yang bersifat netral, imparial, impersonal dan objektif dengan semua jabarannya dalam prinsip *equality before the law*, benar-benar menjadi ajaran yang absoiut. Doktrin ini lalu menyatu dalam pendidikan hukum. Akibatnya, pembelajaran hukum cenderung menghasilkan pelaku-pelaku hukum yang tidak akan pernah melibatkan keyakinan pribadi, nilai-nilai sosial budaya atau pertimbangan subjektif lain. Sistem seperti ini hanya akan menghasilkan para praktisi

profesional. Bukan pemikir hukum. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah para pelaku hukum yang diharapkan dapat membuat keputusan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar berdasarkan ketentuan hukum. Kemudian tidak memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan intelektualitas hukum. Yang akan memberikan nilai kritis, mempertanyakan atau mungkin menentang ajaran-ajaran hukum yang diterimanya.

Kritik terhadap paradigma positivisme ini tidak bermaksud bahwa sistem pengajaran ilmu hukum dengan payung positivisme mutlak dipersalahkan. Tak arif, jika menyatakan satu paradigma adalah yang paling benar atas paradigma yang lain. Karena setiap paradigma pasti mempunyai alasan,

nilai, semangat dan visi yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan.

Buku ini layak dibaca oleh masyarakat yang menggeluti masalah hukum dan keadilan, akademisi, dan praktisi, yang selama ini hanya berorientasi pada peraturan undang-undang. Ukuran buku yang cukup tipis bukanlah sebuah kepastian bahwa buku ini tidak menarik untuk dibaca. Sebaliknya, hal ini justru dapat dijadikan sebagai semangat untuk lebih menggali dan mengembangkan persepektif lain. Keadaan masyarakat akan selalu dinamis, begitu juga seharusnya dengan hukum yang selalu mendukung masyarakat sebagai pembuatnya. Keadilan yang selama ini tercapai tidak jarang hanya mencabik-cabik hati masyarakat. Satu bahan renungan besar buat kita, apakah upaya untuk mewujudkan keadilan yang substansial akan gagal karena terbentur oleh prosedur yang harus dipenuhi dalam legalitas sistem hukum modern? Sudah saatnya kita berbenah untuk mencapai keadilan yang hakiki, keadilan yang substansial. (*g)

Teori hukum kritis berkembang untuk menjawab segala persoalan yang tidak terselesaikan oleh sistem hukum modern (positivisme)

Judul Buku	: Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern
Cetakan	: Pertama, Januari 2005
Pengarang	: Dr. FX Samekto, S.H., M.Hum.
Pengantar	: FX Adji Samekto
Tebal Buku	: (X + 82) halaman
Penerbit	: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Peresensi	: Herlin Susanto

KONT RADIKSI

Engels pernah berkata, "Gerak itu sendiri merupakan kontradiksi". Dasar dari bentuk-bentuk gerak yang sederhana. Gerak mekanik. Dan lebih-lebih lagi dasar dari bentuk-bentuk gerak yang rumit. Hukum kontradiksi di dalam hal-hal, yaitu hukum persatuan dari yang bertentangan, adalah hukum yang paling pokok dalam dialektika materialis. Mengutip Lenin, yang menamakan hukum ini hakekat dialektika (kadang dia juga menyebutnya inti dialektika). Dalam definisinya sendiri, Lenin juga menyebutkan bahwa dialektika adalah studi tentang kontradiksi di dalam hakekat itu sendiri dari hal-hal.

Salah satu prinsip pokok dari ilmu pasti tinggi adalah kontradiksi, walaupun demikian, ilmu pasti rendah pun penuh dengan kontradiksi juga. Dalam bahasa yang sederhana, Lenin menjelaskannya sebagai berikut:

Dalam ilmu pasti: + dan -; diferensial dan Integral

Dalam mekanika: aksi dan reaksi

Dalam fisika: listrik positif dan negative

Dalam ilmu kimia: kombinasi dan disosiasi Atom-atom

Dalam ilmu kemasyarakatan: perjuangan Kelas-kelas

Kita berperang, menggunakan segala taktik yang kita punya. Bertahan, menyerang. Maju, mundur. Kalah, menang. Semua unsur tersebut merupakan kontradiksi. Antonim. Inilah perang, ada proses yang mewujudkan perang itu terjadi, namun di lain waktu menghentikan perang itu sendiri.

Dengan kata lain, kita melihat ada dua hal yang saling bertentangan disini, yang dengan caranya sendiri sebenarnya saling berpengaruh satu sama lain. Gejala-gejala kontradiksi.

Diferensiasi gender: laki-laki dan perempuan. Hitam dan putih. Dalam konsep yang sedikit keilahian pun kita jumpai: malaikat dan iblis, dosa dan pahala. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu baik tanpa mengetahui mana yang buruk. Kita tidak bisa men-declare dengan pasti seseorang sebagai laki-laki tanpa mengetahui perempuan itu seperti apa. Perang berdarah di padang Kurusetra untuk memperebutkan tahta Amarta tidak akan pernah ada tanpa Kurawa dan Pandawa. Dan kedamaian di bumi Alengka tidak akan ada seandainya Rama tidak "membunuh" Dasamuka alias Rahwana. Sayangnya Pandawa tidak dapat mempertahankan tahta Amarta yang berharga seratus nyawa Kurawa, mengingat generasi kedua mereka yang hancur dengan tragis:

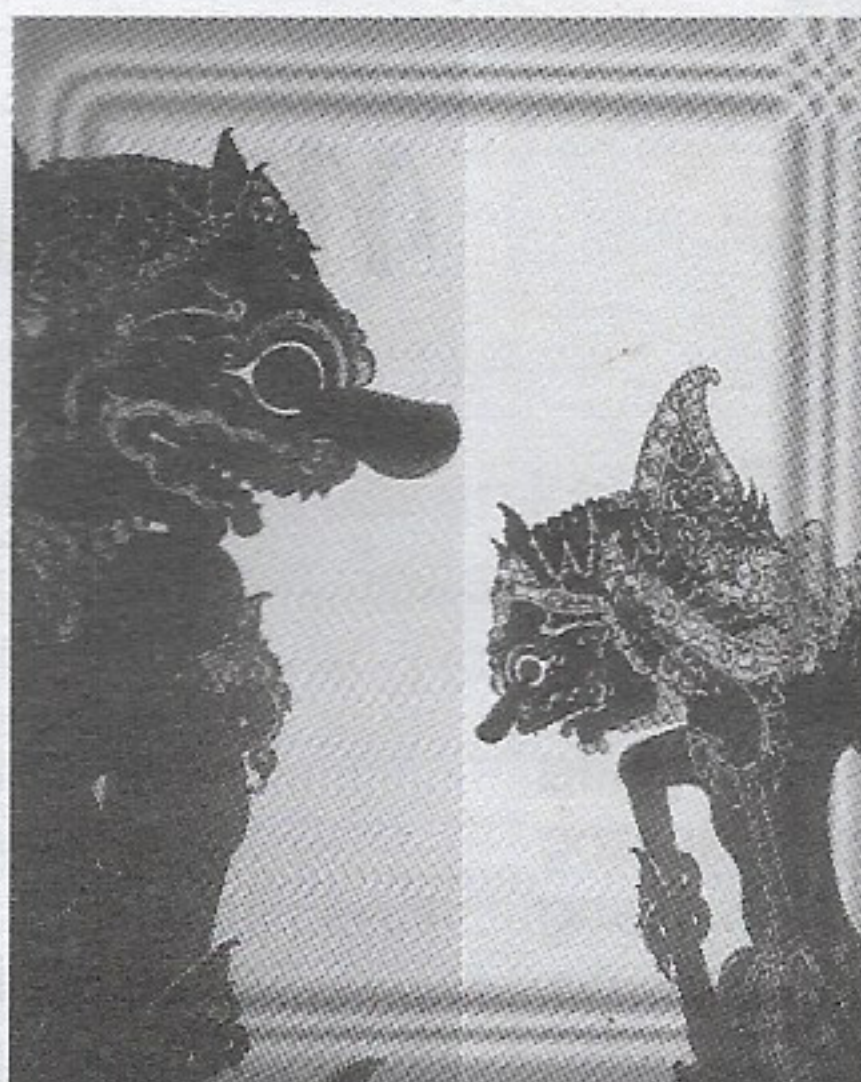
Gatotkaca dan Abimanyu. Lagipula Rahwana tidak matikalaupun boleh saya tafsirkan, dalam lakon Ramayana, dia hanya tertidur. Bumi begitu mencintai darahnya dan menjamin sebuah kehidupan baru baginya kapanpun ia mau selama dia

masih berpijak.

Saya jadi ingat dengan bangsa kita yang menantikan Ratu Adil. Seorang dosen pernah mengatakan dalam kuliahnya, kebudayaan manapun bukan hanya Indonesia, mengenal adanya Ratu Adil. Kita mungkin pernah mendengar kata Mesias, Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menambahkan, kontra-Ratu Adil pun, dalam konsep kebudayaan manapun juga ada. Al-Dajjal, misalnya? Lantas, jika saya percaya Rahwana bisa "hidup" kembali dalam wujud apapun, mungkinkah satu-satunya yang bisa menjadi *counter attack* baginya adalah apa yang kita namakan Ratu Adil? Keadilan dan ketidakadilan.

Kedhaliman. Pernahkah kita berpikir ketika kita berteriak, berkoar-koar mengatasnamakan keadilan sesungguhnya kita melakukan hal yang sama sekali bertentangan? Jangan-jangan kita meneriakkan keadilan di atas penderitaan orang lain, merampas kebahagiaan dan hidup mereka. Bisa saja kita memberikan label seseorang itu dhalim, tidak adil, ketika ternyata sebenarnya yang memulainya adalah kawan terdekat kita sendiri yang menutup mata kita sendiri. Ketika Bima menghukum Dursasana yang melecehkan Drupadi, istri Yudhistirakak ipar Bima, kemudian meminum darahnya sebagai wujud pembalasan dendam, saya pikir dia telah melakukan hal yang salah. Dursasana melecehkan Drupadi atas "izin" Yudhistira yang menjadikan istrinya sendiri sebagai barang taruhan! Tapi Bima yang merasa terhina dan iba melihat kakak iparnya direndahkan Kurawa tidak pernah menghakimi kakaknya Yudhistira, yang memulai awal ketidakadilan terhadap Drupadi, sebagaimana ia menghakimi kemudian menghancurkan Dursasana dengan gadanya.

Cerita-cerita dunia perwayangan agaknya kurang tepat disebut dongeng kepahlawanan. Kedua klimaks Ramayana dan Mahabharata terjadi dalam sebuah perang yang nyaris biadab, dimana manusia yang terlibat di dalamnya hanya memiliki satu pilihan dari dua opsi yang bertentangan satu sama lain. Membunuh atau dibunuh, kalah atau menang, hidup atau mati. Lagi-lagi sebuah kontradiksi. Sebuah tahap baru-kah hasil akhir dari klimaks tersebut, yang terangkat dari benturan tesis dengan antitesis? Keadilan, setelah kedhaliman terbalas? Tapi sejarah ditulis oleh



pihak yang menang, lakon sebuah epik diperankan pemenang perang. Lantas bukan itu yang membuat teori bahwa sejarah sedemikian terpolo dan bisa terulang, karena sejarah tidak akan pernah terulang.

Saya ingin sedikit mengutip dari Mao Tse-Tung (yang ternyata mengutip dari Lenin): hal-hal yang berkontradiksi dan masing-masing dari segi-seginya mempunyai ciri-cirinya masing-masing yang khas, menjadikannya kekhususan dan kerelatifan kontradiksi.

Memisahkan apa yang menjadi pokok dan umum dalam kontradiksi, tanpa melupakan bahwa kedua hal yang sebenarnya kontradiksi itu merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dari semua yang saya renungkan sebelum saya menulis halaman ini, saya hanya menaruh satu harapan, adanya kebebasan untuk memilih antara kedua opsi yang saling bertentangan. Atau tidak memilih keduanya? Bukankah tidak memilih juga merupakan suatu pilihan?

Siapapun mendambakan kebebasan untuk memilih sebuah opsi. Tanpa harus terikat apapun. Garuda bisa bebas terbang di langit, tapi dia masih terikat oleh Dewa Wisnu: *Ik ben Garuda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog boven uw.* "Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauanmu." (***)

Svetlana A. Prasasthi

Laundry Anak Gaul

Cucian kamu mau
BERSIH ?? RAPI ??
CEPAT ??
Datang aja...!! Ke

laundry Riau
Jl. Kaliurang km 4,5 Perum SWAKARYA No 25

R.P. 2500/ KG

変態 変態

TOKUS ANIME

DHOKA

It's NOT Just An ORDINARY !!!

JAKAL KM 5 POGUNG BARU B/13 JOGJAKARTA
0274 565210 / 081 2274 424

SOLY
Advertising

SOLY. CN
JURAGANE

JOMEGATAN No. 360 (DEPAN SMKI) JOGJAKARTA
TELP. 0274-384689, 718317, FAX. 0274-381390